Mengelak dari Jebakan Penghasilan Menengah di Indonesia

Analisa Resiko, Pemecahan Masalah dan Karakteristik Nasional

Oleh: Faisal Basri, Gatot Arya Putra

- Untuk menghindar dari perangkap pendapatan rendah dan menengah solusinya hanya melalui penguatan sektor industri. Untuk itu peran kepemimpinan nasional dalam hal ini presiden sangatlah vital dan sangat menentukan. Nawacita harus digunakan untuk menyukseskan kebijakan industri. Indonesia selama ini tidak memiliki fundamental perekonomian yang menjamin bahwa perekonomian Indonesia akan selamat dari perangkap pendapatan menengah. Lemah dalam sumber daya manusia baik dalam konteks kesehatan dan pendidikan serta tak memiliki visi kebijakan industri yang tegas. Di tambah adanya ketimpangan kekayaan yang semakin meninggi dan secara absolut nilainya sudah sangat tinggi. Padahal kekuatan sumber daya manusia dan harmonisasi sosial adalah persyaratan penting dalam menyukseskan kebijakan industri.
- Sumber daya manusia Indonesia sangatlah lemah terutama dalam konteks kualitas. Lemahnya kemampuan kognitif pelajar Indonesia harus segera diperbaiki agar transformasi perekonomian Indonesia mampu bergerak mulus dari ketergantungan kepada industri berbasis upah murah menuju basis produksi dengan keahlian yang lebih tinggi. Sementara itu rasio pendaftaran sekolah untuk tingkat menengah dan universitas (tingkat tinggi) harus juga segera ditingkatkan. Keberhasilan pendidikan harus diukur dari *output* pendidikan dengan menggunakan barometer internasional seperti yang dilakukan oleh PISA.
- Struktur ekspor Indonesia masih belum memperlihatkan perbaikan dalam meningkatkan peran dari ekspor berbasis teknologi tinggi dengan nilai kontribusinya dalam ekspor yang sangat rendah dan semakin menurun. Sementara itu, kinerja sektor manufaktur juga lemah.
- Untuk memacu pertumbuhan ekonomi tinggi yang berkelanjutan semakin mustahil dapat dilakukan oleh Indonesia karena perkembangan stok modal (dan produktivitas faktor total juga tidak dapat mengimbangi kecepatan pertumbuhan ekonomi negara yang berada pada *frontier* teknologi.
- Kinerja ekonomi Indonesia juga sangat sensitif terhadap krisis yang bersifat eksternal dan memerlukan waktu yang lama untuk kembali pulih padahal perekonomian Indonesia dibandingkan tahun 1960 relatif menjadi semakin agak tertutup perekonomiannya jika diukur dari peran ekspor barang terhadap produk domestik bruto secara Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Purity* – PPP) Peluang perekonomian Indonesia terperangkap dalam pendapatan rendah adalah 80%, peluang untuk menjadi pendapatan menengah hanya sebesar 16%, sedangkan peluang Indonesia untuk masuk menjadi negara berpendapatan tinggi kecil sekali yaitu hanya 3% .

Mengelak dari Jebakan Penghasilan Menengah di Indonesia

Analisa Resiko, Pemecahan Masalah dan Karakteristik Nasional

Oleh:
Faisal Basri dan **Gatot Arya Putra**

Dicetak :
Friedrich-Ebert-Stiftung Indonesia Office
Jalan Kemang Selatan II No. 2 A | Jakarta 12730 | Indonesia
Phone : +62-21-7193711 | Fax: +62-21-71791358
Email :info@fes.or.id | Website: www.fes.or.id

Penangungjawab:
Sergio Grassi, Country Director

ISBN No: 978-602-8866-17-0

DAFTAR ISI

Mengelak dari Jebakan Pendapatan Menengah di Indonesia

Analisis Resiko, Pemecahan Masalah dan Karakteristik Nasional

Pada tahun 2011 berdasarkan *Tabel Penn World* 8.1 (Feenstra, Inklaar and Timmer 2015), Indonesia telah berada pada urutan keenambelas perekonomian terbesar dunia berdasarkan *Paritas Daya Beli* mencatat Pendapatan Domestik Bruto (PDB) per kapita sebesar 4725, India 3917, dan China 8919. Dibandingkan dengan nilainya pada tahun 2000, PDB per kapita China, Indonesia dan India pada tahun 2011 masing-masing telah berubah menjadi 2,3 kali, 1,6 kali dan 2,1 kali. Indonesia yang paling lamban perubahannya. Agar tidak tertinggal dari China dan India maka Indonesia paling tidak harus tumbuh lebih pesat lagi. Kecepatan dan keberkelanjutan dari pembangunan ekonomi adalah kata kuncinya. Masih dalam ParitasDayaBeli tiga perekonomian terbesar dunia pada tahun 2011 adalah Amerika Serikat, China dan India. Pada tahun 2011 Produktivitas Faktor Total *(Total Factor Productivity – TFP)* China adalah 0.4066, India sebesar 0.4835 dan Indonesia adalah 0.4193. Pada tahun 2005, PDB per kapita Indonesia, India dan China masing-masing sebesar 3485, 2606,3 dan 5854,8.

Pada tahun 2014, pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia berdasarkan Paritas Daya Beli adalah 10,517 berdasarkan internasional dolarpada harga berlaku (lihat http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD). *IMF* dalam *World Economic Outlook Database 2015* menyebutkan produk domestik bruto berdasarkan Paritas Daya Beli dalam internasional dolar perkapita Indonesia adalah 10.651. Berdasarkan penelitian spektakuler dari Eichengreen, Park, and Shin (2012, 2013) batas bawah pendapatan (produk domestik bruto perkapita) berdasarkan Paritas Daya Beli bagi negara berpendapatan menengah adalah 10.000. Dengan demikian Indonesia sudah masuk kedalam kategori negara berpendapatan menengah berdasarkan data Bank Dunia dan IMF. Tentu ini merupakan momen yang sangat penting bagi bangsa Indonesia apakah Indonesia akan berhasil menghindari perangkap pendapatan kelas menengah? Apakah kalaupun masuk perangkap kemudian dapat keluar lagi? Tantangan yang dihadapi Indonesia sangatlah berat karena terdapat perangkap. Saat ini paling tidak ada penelitian yang secara nyata mengatakan bahwa perangkap pendapatan kelas menengah dapat terjadi dua kali. Eichengreen, Park dan Shin (2013) mengatakan bahwa perekonomian negara berpendapatan menengah akan dihadang oleh dua ancaman perangkap yaitu perangkap pertama antara pendapatan per kapita 10 ribu hingga 11 ribu dan perangkap kedua antara 15 ribu hingga 16 ribu. (lihat Eichengreen, Barry, Donghyung Park and Kwanho Shin (2013), "Growth Slowdowns Redux: New Evidence on the Middle-Income Trap", NBER Working Paper, 18673, January.)

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Paul Romer mengingatkan dengan dua pertanyaan penting yang berkaitan dengan model pertumbuhan ekonomi yaitu, pertama, mengapa tingkat

pertumbuhan ekonomi pada perekonomian yang menjadi ujung depan teknologi dunia semakin tinggi dengan berjalannya waktu? Konsekuensinya jika Indonesia ingin menjadi negara dengan pendapatan tinggi maka pertumbuhan ekonomi Indonesia harus lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi China, India dan Korea Selatan. Kedua, mengapa begitu banyak negara yang memulai pertumbuhan ekonomi yang jauh dari belakang *frontier* gagal mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam rangka berhasil mengejar ketertinggalannya? Lebih jelasnya dapat dilihat pada http://paulromer.net/speeding-up-and-missed-opportunities-evidence/. Pertanyaan pertama Romer berkaitan dengan perlunya tingkat pertumbuhan per kapita yang semakin tinggi bagi Indonesia agar mencapai frontier pertumbuhan tertinggi pada jamannya untuk mampu tumbuh secara berkelanjutan.

Perlu diingat bahwa berdasarkan Tabel Penn World Indonesia hanya naik satu tingkat dalam besarnya perekonomian dari tahun 2005 hingga 2011 meningkat dari 17 besar dunia menjadi 16 besar dunia. Sementara itu menurut Romer, target tingkat pertumbuhan ekonomi juga semakin tinggi dengan berjalannya waktu. Tingkat pertumbuhan ekonomi masa depan menjadi target bergerak yang bergerak juga semakin cepat. Dengan bergeraknya perekonomian Indonesia selama tahun 2005 hingga 2015 yang relatif tidak terlalu cepat maka potensi perekonomian Indonesia untuk masuk pada frontier atau batas pertumbuhan ekonomi tinggi masihlah belum terlihat.

Pertanyaan kedua Romer berkaitan dengan mencari jawaban mengapa banyak negara gagal mencapai tingkat pertumbuhan yang memadai untuk mencapai ketertinggalannya yang menurut Romer tidak dapat disalahkan kepada negara tersebut hanya semata-mata memiliki kelembagaan yang buruk, sangat korup, langka akan modal sosial atau karena budaya yang tidak maju.Pernyataan Romer ini juga relevan untuk Indonesia. Jika dikatakan kelembagaan di Indonesia paska reformasi lebih baik ketimbang sebelum krisis 1997 mengapa kinerja perekonomian paska reformasi secara relatif juga tidak lebih baik?Tampaknya belum ada perbaikan kelembagaan yang memadai buktinya korupsi saat ini juga tidak kalah maraknya. Menurut Romer, besarnya negara menentukan.Pada masa lalu negara dengan perekonomian kecil (*small economy)* seperti Taiwan, Korea Selatan, Singapura dan Hong Kong-lah yang memiliki kemampuan untuk tumbuh cepat padateknologi tercanggih (*frontier technology*), namun pada saat ini China dan India yang merupakan perekonomian besar (*big economy)* ternyata lebih memiliki peluang untuk tumbuh cepat. Pada gilirannya kedua pertanyaan tersebut akan berimplikasi kepada pertanyaan berikut: Adakah peluang bagi Indonesiasebagai small open economy untuk tumbuh secara relatif lebih cepat dari negara-negara tersebut dan tentunya juga secara berkelanjutan?

Motor Pertumbuhan Ekonomi Yang Tak Meyakinkan

Untuk menjawab pertanyaan Romer yang pertama adalah mencari tahu tingkat kecepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini agar dapat mengetahui apakah perekonomian Indonesia bisa berlari kencang di masa depan? Hal ini penting agar supaya perencana ekonomi dan politisi Indonesia tidak lagi menjual bualan yang membodohi rakyat Indonesia.

Ancaman paling nyata dari lambannya pembangunan perekonomian Indonesia akan semakin jelas jika dibandingkan dengan negara lain yang pada tahun 1960-an kondisinya mungkin secara relatif lebih buruk dari Indonesia tetapi saat ini sudah mampu melewati secara luar biasa kinerja ekonomi Indonesia untuk menghindar dari parangkap pertumbuhan ekonomi. Cara paling sederhana lainnya untuk melihat relatif melambannya motor pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah dengan membandingkannya terhadap negara yang saat ini mampu melewati perangkappendapatan menengah seperti Korea Selatan. Padahal, seperti halnya Indonesia, Korea Selatan juga menghadapi alam politik yang tidak demokratis paling tidak sebelum krisis Asia tahun 1998 yaitu sebelum 1987.

Berdasarkan *Tabel Penn World* (Tabel Penn World 8.1 (Feenstra, Inklaar and Timmer 2015), pada tahun 1960, Stok modal Indonesia jauh lebih besar dari Korea Selatan dengan rasio stok modal Indonesia terhadap Korea Selatan sebesar 2,57, namun pada tahun 2011 angka rasio itu menjadi mengkerut menjadi 0,59. Indonesia jelas keteteran dalam hal ini dalam mengimbangi Korea Selatan. Perkembangan rasio ini secara nyata memperlihatkan bahwa rejim politik di Indonesia dari Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi gagal membangun Stok modal secara relatif! Target Indonesia ke depan agar tidak tertinggal dari Korea Selatan adalah membawa rasio ini ke pantas angka satu. Jika hal itu dapat dilakukan maka akan ada harapan bahwa perekonomian Indonesia akan mampu melewati perangkap pendapatan menengah. Stok Modal dihitung dengan paritas daya beli berlaku berdasarkan dolar tahun 2005. Korea Selatan memacu stok modalnya sehingga pada tahun 1974 mampu melewati stok modal Indonesia. Memasuki tahun 1990-an, stok modal Indonesia secara relatif hanya setengah dari stok modal Korea Selatan. Pada tahun 1991 stok modal Indonesia 0,64 kali stok modal Korea Selatan, dan pada tahun 2000 nilai stok modal Indonesia 0,59 kali stok modal Korea Selatan. Indonesia tenggelam!

Sementara *share of gross capital formation at current* paritas daya beli di Indonesia lebih kecil dibandingkan Korea Selatan sepanjang sejarah. Kemampuan Indonesia melakukan akumulasi pembentukan modal bruto dalam perekonomian juga selalu dibawah Korea Selatan. Artinya peluang Indonesia untuk memiliki kinerja ekonomi yang sukses untuk menjadi negara berpendapatan maju juga secara relatif tidaklah besar. Pada tahun 1960, pangsa pembentukan modal bruto Indonesia 0.046 jauh lebih kecil ketimbang Korea Selatan yang pangsanya adalah 0.11. Pada tahun 2011 nilai Indonesia juga lebih kecil dari Korea Selatan, dimana nilai Indonesia

0.22 sedangkan Korea Selatan adalah 0.33. Lemahnya pangsa pembentukan modal bruto di Indonesia menyebabkan modal saham Indonesia yang pada tahun 1960 lebih besar dari Korea Selatan menjadi lebih kecil pada periode paska 1974. Pada saat krisis 1998, pangsa pembentukan modal bruto Indonesia turun mernjadi 0.18 dari 0.23 di tahun 1997. Nilai ini turun pada tahun 1999 hingga 2002 dengan pangsa di bawah 20% secara berurutan nilai pangsa masing-masing tahun tersebut adalah 0.15, 0.17, 0.19 dan 0.19. Sementara Korea Selatan pada tahun 1998 turun menjadi 0.26 dari 0.36 di tahun 1997. Kemudian pada tahun 1999 naik menjadi 0.29. Mulai tahun 2000 Korea Selatan sudah memiliki pangsa di atas 30% yaitu 0.31. Korea Selatan sudah menembus pangsa 30 semenjak tahun 1977 yang pada tahun tersebut kontribusinya adalah 0.33. Belajar dari Korea Selatan, jika Indonesia ingin selamat dari perangkap pendapatan menengah maka perekonomian Indonesia sebaiknya juga harus dapat mencapai pangsa pembentukan modal bruto di atas 30% secepatnya dan tentunya juga harus berkelanjutan. Bukan hal yang mudah karena nilai rasio 30% tersebut belum pernah dimiliki oleh Indonesia, selain pangsa ini juga sangat sensitif terhadap krisis.Pentingnya investasi tetap bagi suksesnya industrialisasi dinyatakan oleh Arias dan Wen (2015): *"For one thing, technology isnot free; so, fixed investment is necessary for adopting newtechnologies.The implication is that policies that help attract foreign direct investment and promote domestic saving and exports of manufactured goods are more likely to overcome the barriers of technology transfers, as the experiences of Mexico and Ireland showed".*

Namun dari sisi sumber daya manusia berdasarkan *Tabel Penn World* 8.1 (Feenstra, Inklaar and Timmer 2015), dalam sejarahnya hingga saat ini Indonesia juga selalu kalah jika dibandingkan dengan Korea Selatan. Padahal data sumber daya manusia dihitung dengan indeks per orang berdasarkan lamanya tahun sekolah dan bukan kemampuan kognitif. Pada tahun 1960, rasio sumber daya manusia Indonesia dibandingkan Korea Selatan ini adalah 0,70 dan pada tahun 2011 nilai rasio ini menjadi 0,62. Sepanjang periode ini rasio terendah adalah 0,59-an yang terjadi selama 1993 hingga 1999. Jelas sekali bahwa pemerintah Indonesia semenjak Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi tidak menjalankan tugasnya dengan baik dalam membangun sumber daya manusia.

Begitu pula dengan Produktivitas Total Faktor (TFP) berdasarkan *Tabel Penn World* 8.1 (Feenstra, Inklaar and Timmer 2015), dimana pada tahun 1960, Indonesia memiliki TFP sebesar 0,48 relatif terhadap Amerika Serikat yang bernilai satu, sementara Korea Selatan adalah 0,31 (dan Amerika Serikat sebesar satu). Nilai TFP ini dihitung secara relatif terhadap Amerika Serikat. Dengan berjalannya waktu nilai TFP Indonesia pada tahun 2011 menjadi 0,41, Korea Selatan meningkat menjadi 0,69 (Amerika Serikat adalah satu). Selama periode ini Indonesia mencapai nilai tertinggi sebesar 0,65 pada tahun 1995 menjadi 0,61 pada tahun 1997 dan turun drastis menjadi 0,44 pada 1998. Sementara Korea Selatan pada saat yang sama 0,76 pada tahun 1995, pada tahun 1997 sebesar 0,74 dan 0,70 pada tahun 1998. Krisis ekonomi Asia pada tahun 1998 menghantam TFP Indonesia secara besar-besaran, namun Korea Selatan mampu menjaga

nilai TFP nya pada angka di atas 0,70. Dengan kinerja TFP yang relatif rendah dan rentan turun karena ancaman krisis maka perekonomian Indonesia juga semakin rentan dalam kesiapannya menghindari perangkap pendapatan menengah.

Dari sisi konsumsi riil dari rumah tangga dan pemerintah berdasarkan *Tabel Penn World* 8.1 (Feenstra, Inklaar and Timmer 2015) yang juga berdasarkan paritas daya beli harga dolar 2005, pada tahun 1960 konsumsi Indonesia 2,53 kali konsumsi Korea Selatan. Di satu pihak, pangsa konsumsi rumah tangga terhadap produk domestik bruto Indonesia adalah 0.53, sementara Korea Selatan 0.79. Pada tahun 2011, besarnya konsumsi Indonesia menjadi 0,99 kali konsumsi Korea Selatan. Pangsa konsumsi rumah tangga Indonesia dan Korea Selatan pada tahun ini masing-masing adalah 0.62 dan 0.49. Dengan kata lain perekonomian Indonesia semakin tergantung kepada konsumsi rumah tangga ketimbang perekonomian Korea Selatan, namun besarnya konsumsi tersebut hampir sama besarnya. Korea Selatan secara sistematis melakukan transformasi perekonomian yang menurunkan peran konsumsi rumah tangganya sementara Indonesia justru meningkatkan peran tersebut. Bagaimana dengan peran konsumsi pemerintah? Pada tahun 2011, pangsa konsumsi pemerintah Indonesia dan Korea Selatan masing-masing adalah 0.12 dan 0.13. Sementara pangsa konsumsi pemerintah Indonesia dan Korea Selatan pada tahun 1960 masing-masing adalah 0.09 dan 0.18. Seperti dalam halnya konsumsi rumah tangga, perekonomian Korea Selatan secara sistematis menurunkan peran konsumsi pemerintah dalam perekonomiannya sementara itu Indonesia mengalami hal yang sebaliknya.

Pada saat krisis Asia tahun 1998, berdasarkan paritas daya beli rasio konsumsi antara Indonesia dan Korea Selatanini mencapai angka satu dan kemudian turun menjadi 0,81 pada tahun 2002. Krisis ekonomi Asia tahun 1998 tampaknya lebih berdampak serius bagi Indonesia dari sisi konsumsi ketimbang Korea Selatan. Upaya Indonesia menjadikan pasar domestik sebagai alternatif pasar luar negeri sangat beresiko mengingat rentannya penurunan konsumsi domestik akibat guncangan eksternal .

Ukuran lainnya adalah daya absorpsi ekonomi domestik, dimana pada tahun 1960 berdasarkan *Tabel Penn World* 8.1 (Feenstra, Inklaar and Timmer 2015) daya absorpsi ekonomi domestik Indonesia 2,43 kali Korea Selatan, namun pada tahun 2011 menjadi 0,84. Daya absorpsi ekonomi domestik memasukkan juga investasi. Pada saat krisis tahun 1998, nilai rasio ini adalah 0,92 dan turun menjadi 0,77 tahun 1999. Jelas sekali daya serap perekonomian Indonesia bukan saja menjadi lebih rendah dari Korea Selatan tetapi juga sangat sensitif terhadap krisis ekonomi. Sekali lagi, upaya menjadi pasar domestik sebagai alternatif utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia di tengah krisis ekonomi akan menghadapi resiko yang tinggi.

Berdasarkan PDB per kapita dari sisi pengeluaran berdasarkan rantai paritas daya beli pada dolar 2005 dari *Tabel Penn World* 8.1 (Feenstra, Inklaar and Timmer 2015) (PPP Converted GDP

Per Capita (Chain Series), at 2005 constant prices), pada tahun 1960 produk domestik bruto per kapita Indonesia sebesar 0,73 PDB per kapita Korea Selatan. Sementara itu pada tahun 2011, rasio itu menjadi 0,17. Indonesia semakin jauh tertinggal. Jelas sekali bahwa tetangga kita Korea Selatan telah "berlari" sangat cepat dibandingkan Indonesia. Dengan data tersebut masihkah ada optimisme bahwa Indonesia akan mampu terbebas dari perangkap pendapatan menengah mengingat kecepatan pertumbuhan dalam pembangunan ekonominya tidaklah istimewa? Rasanya memang berat. Berkaitan dengan pertanyaan Romer, hal pertama tampak sekali bahwa kecepatan pertumbuhan ekonomi Indonesia belum mencapai tahap istimewa. Jangankan membalap kinerja Korea Selatan, tanda-tanda bahwa kinerja perekonomian Indonesia mampu mendekati kinerja Korea Selatan saja jauh panggang dari pada api.

Tentu hal ini bukan kesalahan pemerintahan Joko Widodo karena buruknya kinerja ekonomi Indonesia dihasilkan tumpukan kesalahan yang dihasilkan oleh pemerintahan Orde Lama, Orde Baru hingga pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Harus diakui bahwa tugas pemerintahan presiden Joko Widodo sangatlah berat untuk menjamin bahwa Indonesia terbebas dari parangkap pendapatan menengah.

Sumber Daya Manusia Dalam Kondisi Kritis

Menurut Eichengreen, Park dan Shin (2013) untuk menghindari perangkap ini maka resepnya adalah: *"That a large share of high-tech exports is negatively associated with the likelihood of a slowdown points to the same conclusion. Intuitively, the inherited stock of human capital shapes a country's ability to move up the technology ladder and its capacity export products embodying advanced technology. As they reach middle income status, emerging markets typically import advanced technology from more advanced countries. Taking the next step, which involves adapting imported technology to local conditions and embodying it in exports with high local content, requires a pool of highly skilled workers. (Page 13)."*

Selanjutnya mereka mengatakan, *"Other variables, from political regime changes and financial instability to trade openness and terms-of-trade shocks, also show some association with growth slowdowns. But compared to educational attainment and the structure of exports, they are less robustly related. (Page 13)".*

Menarik untuk mencermati kualitas pendidikan di Indonesia. Di atas sudah dibahas sumber daya manusia berdasarkan lamanya sekolah. Bagaimana dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia dari kemampuan kognitifnya? Hasilnya juga sangat tidak menggembirakan. Pertama, kinerja kemampuan kognitif pelajar Indonesia jika dibandingkan dengan sesama negara berkembang juga melempem. Paling efektif jika dibandingkan dengan Thailand sebagai sesama negara berkembang yang kebetulan juga merupakan negara ASEAN. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh PISA dari tahun 2003 hingga 2012 terbukti bahwa kinerja kemampuan

matematika pelajar sekolah dasar Indonesia mengalami perlambatan. Lebih jelasnya lihat OECD (2013) PISA 2012 *Results: What Students Know and Can Do. Student Performance in Reading, Mathematics and Bidang sains* (*Volume I*), Paris. Perlambatan artinya terjadi penurunan skor dalam nilai matematika dalam periode hampir sepuluh tahun. Ini menunjukkan pelajar menjadi bertambah bodoh dalam matematika. Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut namun pelajarnya dalam hal matematika bertambah bodoh. Semantara Thailand pelajar sekolah dasarnya menjadi lebih pintar dalam matematika dalam periode yang sama. Indonesia mengalami pembodohan sebesar 0,7 dalam matematika dan Thailand menjadi pemintaran sebesar 0,2. Negara perekonomian kecil mampu melewati perangkap pendapatan menengah seperti Taiwan, pelajar sekolah dasarnya mengalami proses bertambah pintar dalam matematika dengan kecepatan yang sangat tinggi yaitu 1,3. Lebih jelasnya lihat Tabel 1. Perlu diingat bahwa ada korelasi positif antara pendapatan dan kemampuan ber-matematika. Pada tahun 2012, posisi Indonesia berada pada nomor dua terakhir di atas Argentina dalam persentase pelajar yang mencapai tingkat kemampuan matematika yang baik (level 5 dan 6) dengan jumlah 0,3% dari keseluruhan pelajar. Persentase pelajar yang sangat rendah kemampuan matematikanya mencapai 75,7% (di bawah level 2)

Kecenderungan semakin bodoh atau semakin pintar dalam matematika juga berlaku dalam membaca. Pada tahun 2012, Indonesia memiliki persentase pelajar dalam membaca pada tingkat pandai (level 5 dan 6) nomor dua dari negara yang diobeservasi dengan nilai persentase 0,1% dari total pelajar, sementara yang berada pada tingkat bodoh mencapai 55,2% (di bawah level 2). PISA dengan persentase pelajar di bawah 1%. Pelajar sekolah dasar di Indonesia juga megalami proses pembodohan dalam membaca dalam periode observasi tersebut dengan tingkat pembodohan sebesar 0,4. Proses pembodohan di matematika terjadi hampir dua kali lebih buruk ketimbang proses pembodohan di membaca. Sementara pelajar sekolah dasar Thailand mengalami proses pemintaran dalam membaca sebesar 0,7. Artinya, pelajar sekolah dasar Thailand dalam hal membaca menjadi proses pemintaran yang lebih cepat ketimbang proses pemintaran di bidang matematika dengan kecepatan pemintaran lebih dari tiga kalinya matematika. Bagaimana dengan Taiwan? Mengagumkan, Taiwan mengalami proses pemintaran dalam membaca sebesar 1,6. Lihat Tabel 2. Lagi seperti halnya prestasi dalam matematika, pelajar sekolah dasar Taiwan memiliki skor pemintaran membaca yang juga di atas satu. Artinya proses belajar di Taiwan sangatlah efektif.

Bagaimana dengan *bidang sains*? Menurut PISA pada tahun 2012, Indonesia menempati posisi juru kunci dalam persentase pelajar yang mencapai pintar membaca (level 5 dan 6) di bawah 0,1%, sedangkan yang sangat bodoh 66,6% (di bawah level 2). PISA juga meneliti perkembangan ini dari tahun 2006 hingga 2012 (lihat Tabel 3). Dalam periode ini pelajar sekolah dasar Indonesia mengalami proses pembodohan tahunan dengan nilai pembodohan sebesar 1,9. Pelajar sekolah dasar Thailand selama periode ini mengalami proses pemintaran tahunan dalam bidang sains sebesar 3,9. Sebuah kemajuan yang spektakuler. Singapura mencatat skor

3,3. Sementara pelajar Malaysia juga mengalami pembodohan sebesar 1,4. Bagaimana dengan Taiwan? Taiwan memang mengalami kemunduran dalam skor bidang sains dengan kemunduran tahunan sebesar 1,5. Namun harus diingat Taiwan memiliki nilai rata-rata skor dalam *bidang sains* yang lebih tinggi dari rata-rata nilai pelajar OECD (lihat Tabel 4). Tahun 2009, nilai rata-rata skor *bidang sains* Taiwan adalah 520 sementara Indonesia dan Thailand masing-masing adalah 383 dan 425. Rata-rata skor pelajar OECD, Singapura dan Malaysia pada tahun 2009 adalah 501, 542 dan 422.

Menarik untuk melihat sejauhmana pendidikan dasar di Indonesia mampu mengurangi kesenjangannya terhadap pelajar OECD. Dalam bidang bidang sains kesenjangan tersebut justru semakin melebar (lihat Tabel 4). Skor pelajar Indonesia dalam bidang sains justru terus menurun dari dalam PISA 2006 dan PISA 2009 dengan skor masing-masing 393 dan 383. Sementara dalam bidang yang sama, skor rata-rata pelajar OECD pada tahun 2006 dan 2009 masing-masing adalah 498 dan 501. Dengan kata lain dari sisi sumberdaya manusia, Indonesia justru semakin tertinggal dari OECD.

Pada tahun 2003, dalam bidang matematika mencapai skor 360 sementara rata-rata OECD adalah 500 (lihat tabel 5), tahun 2006, skor rata-rata pelajar Indonesia dalam matematika adalah 391 sementara rata-rata OECD adalah 498. Artinya kesenjangan mengecil karena skor Indonesia membaik dan OECD menurun. Tahun 2009, skor rata-rata pelajar Indonesia menjadi 371 sementara OECD menjadi 496. Dibandingkan dengan tahun 2006 terjadi pelebaran kesenjangan. Namun dibandingkan dengan tahun 2003 terjadi penurunan kesenjangan.

Dalam hal membaca, kesenjangan menurun namun masih dalam jumlah kesenjangan yang cukup lebar (lihat Tabel 6). Dari tahun 2000 hingga 2009, rata-rata nilai pelajaran membaca pelajar sekolah dasar OECD menurun dari 496 ke 494. Sementara rata-rata nilai membaca pelajar Indonesia membaik nilainya dari 371 ke 402. Sayang pada tahun 2012 skor Indonesia turun menjadi 396.

Semakin sempurna sudah ketertinggalan Indonesia dalam sumber daya manusia. Berdasarkan prestasi belajar pelajar sekolah dasar dalam matematika, membaca dan ilmu pengetahuan alam tampak jelas bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi tinggi dari akumulasi sumber daya manusia di Indonesia dari sisi kognitif sebagaimana juga dari sisi lamanya sekolah belum bisa dijadikan pijakan bagi terciptanya pertumbuhan tinggi dalam perekonomian Indonesia pada perekonomian dengan *frontier* teknologi. Berdasarkan Indikator Pembangunan Dunia (*World Development Indicator*) 2012 rasio persyaratan masuk sekolah untuk pendidikan sekunder di Indonesia pada tahun 2011 adalah 74,8%, sementara Korea Selatan adalah 95,6%. Sementara itu untuk pendidikan tinggi pada tahun 2011, Indonesia mencapai 27,2% dan Korea Selatan sudah mencapai 100% .

Rasio ketergantungan di kedua negara menurun, namun Korea Selatan mengalami penurunan yang lebih cepat dari Indonesia. Lihat Grafik 1. Dengan demikian, dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang secara relatif lebih buruk dari Korea Selatan, usia produktif (15 tahun hingga 64 tahun) di Indonesia juga harus menanggung beban yang lebih berat ketimbang usia produktif di Korea Selatan.

Berdasarkan *Tabel Penn World* 8.1 (Feenstra, Inklaar and Timmer 2015), rendahnya kualitas sumber daya manusia di Indonesia juga tercermin dari pangsa kompensasi pekerja dalam produk domestik bruto yang lebih rendah dari Korea Selatan. Pada tahun 1960, kontribusi balas jasa pekerja terhadap PDB di Indonesia dan Korea Selatan masing-masing adalah 46,3% dan 66%. Sedangkan pada tahun 2011, masing-masing adalah 46,7% dan 54,5%. Di Indonesia, kontribusi nilai tambah pekerja selalu di bawah 50% PDB sementara di Korea Selatan selalu di atas 50% PDB. Pekerja di Indonesia menikmati pembagian "kue" pembangunan yang lebih kecil secara relatif dibandingkan dengan pekerja di Korea Selatan dari tahun 1960 hingga 2011.

Grafik 1. Rasio Ketergantungan *(Dependency Ratio)*
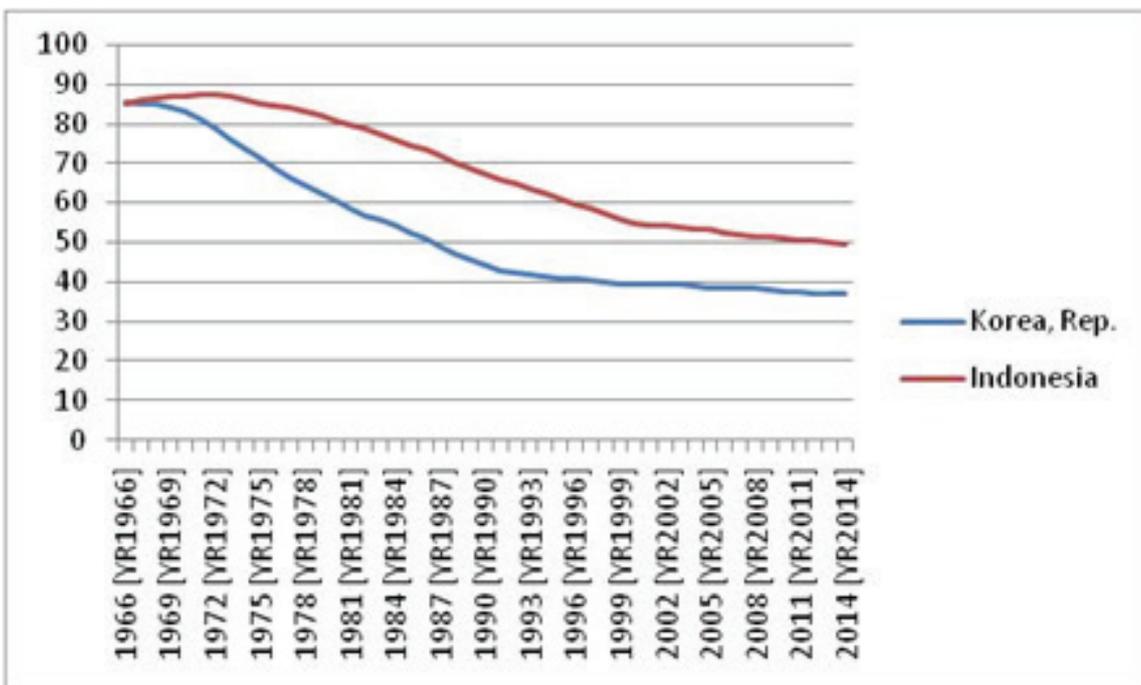
Sumber: *World Development Indicator 2015*

Pendidikan tidak akan berhasil jika manusia yang didik tidak sehat. Reformasi jaminan sosial merupakan persyaratan penting dalam menjamin kualitas sumber daya manusia Indonesia yang lebih baik dalam rangka meningkatkan kapasitas absorpsi akan teknologi. Anders Isaksson (July 2007), *"By absorptive capacity is meant a wide range of capacities, from the most basic skills in reading, writing and mathematics to scientific and other advanced capabilities. Empirical indicators usually only include R&D and human capital, the latter in a very broad sense so that*

it includes health and experience in addition to education. Viewing these indicators in terms of absorptive capacity, it is suggested that the effect on TFP is direct".

Padahal untuk menjaga pekerja tetap produktif dan juga agar mereka dapat belajar melalui pendidikan formal dan *training* yang baik kesehatan merupakan syarat utama. Dengan menurunnya kesejahteraan pekerja maka peran negara wajib hukumnya untuk memberikan jaminan kesehatan. Sungguh ironis jika Indonesia yang kesejahteraan masyarakatnya lebih rendah dari masyarakat negara maju, masyarakatnya harus menanggung biaya kesehatan. Sementara itu di negara maju, mayoritas biaya kesehatan ditanggung oleh sektor publik dan bukan sektor swasta. Di Indonesia hanya 40% dari pengeluaran kesehatan ditanggung oleh sektor publik sementara di negara maju rata-ratanya mencapai 72%. Bagaimana Indonesia mampu mengejar ketertinggalannya dalam sumber daya manusia? Jelas harus ada kemauan politik (*political will*). Menurut OECD (2014) dalam laporannya mengenai statistik kesehatan Indonesia mengatakan: *"Total health spending accounted for only 3.0% of GDP in Indonesia in 2012, three times less than the OECD average of 9.3%. Health spending as a share of GDP among OECD countries is highest in the United States, which spent 16.9% of its GDP on health in 2012. Health spending tends to rise with incomes, and generally countries with higher GDP per capita also tend to spend more on health. It is not surprising, therefore, that Indonesia ranks well below the OECD average in terms of health expenditure per capita, with spending of only USD 150 in 2012 (adjusted for purchasing power parity), compared with an OECD average of USD 3484.The public sector is the main source of health funding in nearly all OECD countries. In Indonesia, 40% of health spending was funded by public sources in 2012, much lower than the average of 72% in OECD countries".*

Selain sisi permintaan akan kesehatan yang lemah, sistem kesehatan di Indonesia juga menghadapi lemahnya sistem penawaran akan kesehatan. OECD (2014): *"With an estimated 0.3 physicians per 1000 population in 2012, Indonesia had much fewer doctors per capita than the OECD average of 3.2. Indonesia only had 1 nurse per 1000 population in 2012, also a much lower number than the OECD average (8.8 nurses)".*

Dengan kondisi sisi penawaran yang seperti ini maka sekalipun sistem asuransi kesehatan untuk semua berjalan maka masyarakat tetap akan menghadapi sulitnya akses terhadap fasilitas kesehatan. Artinya kondisi "leher botol" akan terjadi. Dengan demikian, perbaikan dari sisi penawaran juga harus diperbaiki secepatnya.

Masalah lain yang mendasar dari kesehatan publik adalah lemahnya kualias sumber daya manusia Indonesia karena tidak memadainya imunisasi. Tanpa kesehatan sangatlah sulit mengharapkan pelajar dapat belajar dengan baik dan pekerja dapat bekerja secara produktif. OECD (2014): *"There continues to be gaps in the vaccination rates of children in Indonesia: 64% only of childrenwere vaccinated against diphtheria, tetanus and pertussis (DTP) in 2012, while*

the coverage rate was higher for measles at 80%. This is lower than the coverage rate in most OECD countries which is close to 100%".

Tanpa keseriusan pemerintah membenahi sektor kesehatan publik maka keinginan Indonesia menciptakan sumber daya manusiayang berkualitas untuk mengejar kualitas sumber daya manusianegara OECD semakin jauh panggang dari api.

Pemerintah juga berani memberikan subsidi bagi pendidikan dokter dan perawat. Idealnya pendidikan menjadi dokter dan perawat adalah gratis di Indonesia mengingat kesehatan adalah persyaratan utama dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas di manapun. Kebutuhan ini sangat mendesak. Langkah solusi dalam jangka pendek adalah memberikan akses kemudahan bagi dokter dan perawat asing untuk melakukan praktek di Indonesia.

Kinerja Ekspor Manufaktur Mendorong Indonesia Masuk Perangkap

Maddison (2001) mengingatkan pentingnya sektor manufatur khususnya di Amerika Serikat sebagai motor inovasi yang meningkatkan produktivitas Amerika Serikat sehingga mampu menyalip Inggris dimana sektor manufaktur menghasilkan lembaga-lembaga penelitian yang berhubungan positif dengan berinterakasi dengan penelitian di universitas.

Maddison (2001 page 101) mengatakan: *"The leading role in developing these twentieth century technologies was played by the United States, which had become the world leader in terms of productivity and per capita income. The driving forces of innovation had changed from the nineteenth century, with a reduced role for the individual inventor, and greater emphasis on applied scientific research of a type which the United States pioneered. It institutionalised innovation in a way the United Kingdom had never done. In 1913, there were about 370 research units in US manufacturing employing 3500 people. By 1946 there were 2300 units employing 118 000. In 1946 there were four scientific workers in US manufacturing per 1 000 wage earners, five times the ratio in the United Kingdom. US government–sponsored research played a much more important role in agriculture and mining than in the United Kingdom, and the link between business firms and universities was closer (see Mowery and Rosenberg, 1989)."*

Kontribusi nilai tambah sektor manufaktur dalam PDB Indonesia pada tahun 1966 lebih rendah dari Korea Selatan, namun pada tahun 1996 hingga 2006 nilai rasio Indonesia beberapa tahun mengungguli Korea Selatan. Namun, mulai tahun 2001, rasio Indonesia mengalami penurunan secara sistematis sementara itu Korea Selatan terus memperlihatkan kecenderungan peningkatan (lihat Grafik 2). Rasio tertinggi Indonesia adalah pada tahun 2001 dengan nilai 29,1 % . Ini juga merupakan era dimana Indonesia mulai mengandalkan ekspor komoditas tambang dan pertanian. Perekonomian Indonesia justru semakin tidak bersahabat dengan sektor manufaktur.

Korea Selatan mampu menghindari jebakan pendapatan menengah (*middle income trap*) dengan mempertahankan kinerja sektor manufaktur yang konsisten dalam perekonomiannya. Resep keberhasilan Korea Selatan ini tidak dimiliki oleh Indonesia. Penurunan kontribusi nilai tambah sektor manufaktur dalam perekonomian Indonesia juga mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia gagal bersaing dengan sektor manufaktur negara lain yang mengandalkan upah murah dan sementara itu juga gagal bersaing dengan sektor manufaktur negara maju yang mengandalkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian yang tinggi dan mampu melakukan inovasi. Indonesia tidak dapat mengelola transformasi perubahan dari pertumbuhan yang didorong oleh sumber daya alam, dengan upah murah, menuju pertumbuhan ekonomi yang berbasis teknologi yang lebih tinggi!

Grafik 2. Pangsa Nilai Tambah Manufaktur Terhadap Produk Domestik Bruto

35
30
25
20
15
10
5
0
1966 [YR1966]
1969 [YR1969]
1972 [YR1972]
1975 [YR1975]
1978 [YR1978]
1981 [YR1981]
1984 [YR1984]
1987 [YR1987]
1990 [YR1990]
1993 [YR1993]
1996 [YR1996]
1999 [YR1999]
2002 [YR2002]
2005 [YR2005]
2008 [YR2008]
2011 [YR2011]
2014 [YR2014]
Indonesia
Korea, Rep.
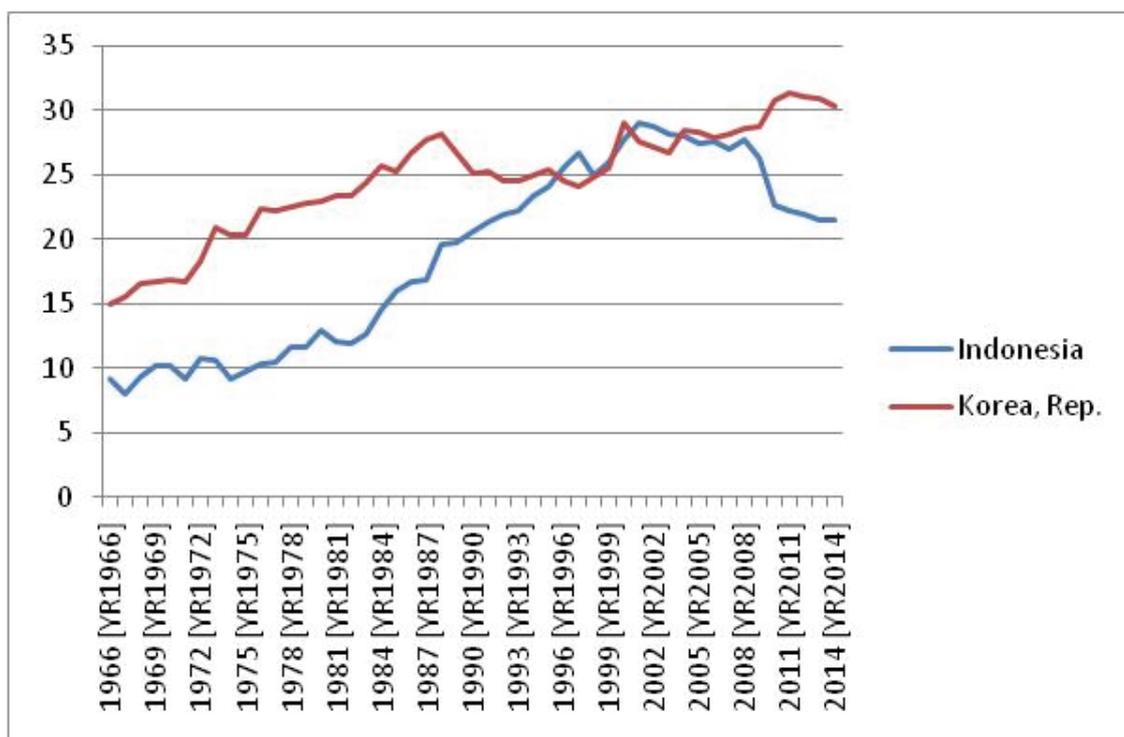
Sumber: *World Development Indicator 2015*

Kontribusi ekspor manufaktur dalam ekspor barang di Korea Selatan bukan hanya di atas 80% tetapi juga memperlihatkan perkembangan yang stabil, sementara di Indonesia akhir-akhir ini masih di bawah 40% dengan tren yang fluktuatif dengan kecenderungan yang menurun. Lebih jelasnya lihat Grafik 3. Yang dimaksud manufaktur di sini adalah *commodities in SITC sections* 5 (Kimia), 6 (manufaktur dasar), 7 (mesin dan alat transportasi), and 8 (*miscellaneous manufactured goods*), *excluding division 68 (non-ferrous metals*). Krisis ekonomi Asia tahun 1998 berpengaruh kepada kedua negara dimana terjadi tren penurunan kontribusi ekspor manufaktur, namun pengaruhnya lebih besar di Indonesia yang turun dari rasio 50% menjadi di

bawah 40% . Di Korea Selatan sekalipun terjadi penurunan rasionya masih berada pada 80%-an. Jelas sekali guncangan eksternal menyebabkan sektor manufaktur Indonesia menjadi tidak berkelanjutan perkembangannya. Krisis yang bermula dari guncangan eksternal merupakan ancaman serius bagi Indonesia jika ingin menghindar dari perangkap pendapatan menengah.

Dari sisi *share of merchandise exports* terhadap PDB pada paritas daya beli terkini, pada tahun 1960 kontribusinya di Indonesia dan Korea Selatan masing-masing adalah 0,39 dan 0,009. Artinya pada mulanya perekonomian Indonesia sudah berbentuk *small open economy* sementara Korea Selatan merupakan *small and relatively closed economy*. Transformasi perekonomian di kedua negara selanjutnya memperlihatkan bahwa tingkat keterbukaan ekonomi di Korea Selatan terus membesar, sementara di Indonesia cenderung semakin mengecil. Indonesia selama Orde baru mengadopsi strategi substitusi impor dan Korea Selatan pada periode tersebut mengadopsi strategi promosi ekspor. Pada tahun 1973 nilainya di Indonesia menurun dan di Korea Selatan meningkat masing-masing menjadi 0,24 dan 0,14. Pada tahun 1980, nilai Indonesia dan Korea Selatan masing-masing adalah 0,23 dan 0,25. Terlihat peran ekspor barang terhadap PDB di Indonesia terus turun sementara Korea Selatan meningkat terus. Nilainya pada tahun 1988 yang merupakan era substitusi impor terparah di Indonesia dimana nilai Indonesia dan Korea Selatan masing-masing adalah 0,095 dan 0,26. Saat krisis ekonomi tahun 1998, rasio untuk Indonesia adalah 0,14 dan untuk Korea Selatan adalah 0,28. Tahun 2011, nilai Indonesia adalah 0,19 dan Korea Selatan sudah mencapai 0,46.

Grafik 3. Pangsa Ekspor Manufaktur terhadap Ekspor *Merchandise*

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1966 [YR1966]
1969 [YR1969]
1972 [YR1972]
1975 [YR1975]
1978 [YR1978]
1981 [YR1981]
1984 [YR1984]
1987 [YR1987]
1990 [YR1990]
1993 [YR1993]
1996 [YR1996]
1999 [YR1999]
2002 [YR2002]
2005 [YR2005]
2008 [YR2008]
2011 [YR2011]

Indonesia
Korea, Rep.
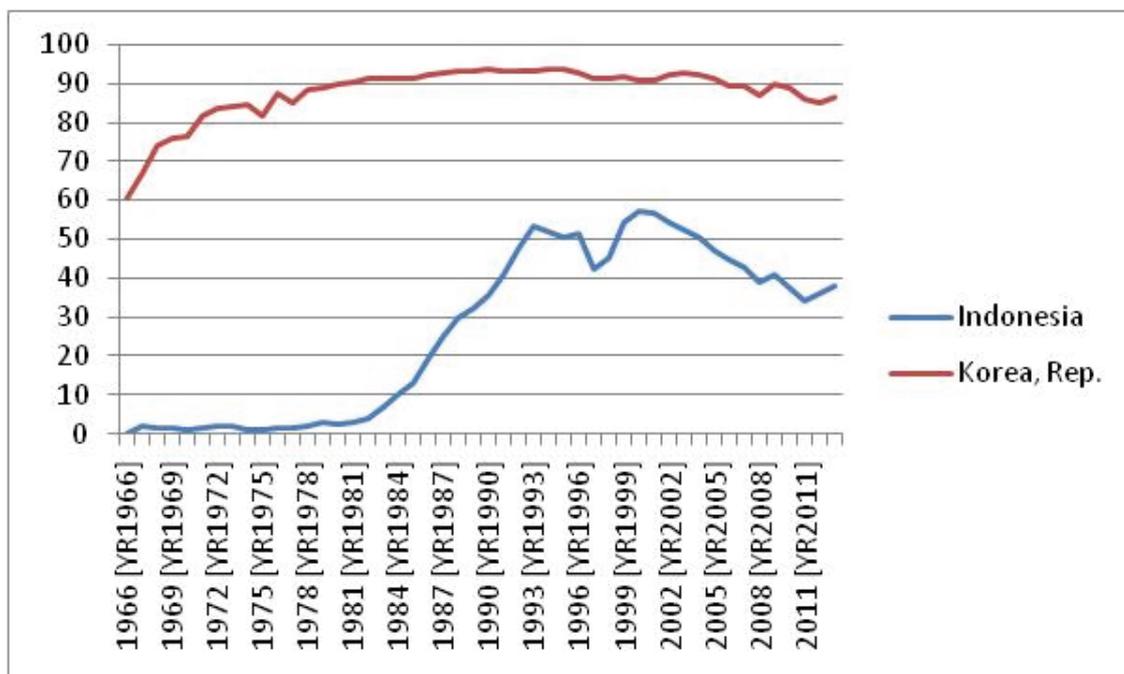
Sumber: *World Development Indicator 2015*

High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery. Dari Grafik 4 terlihat jelas bahwa kontribusi ekspor teknologi tinggi terhadap ekspor dari Korea Selatan sudah tinggi dari tahun 1960-an dan memiliki kecenderungan yang terus meninggi hingga akhirnya melewati batas rasio 30%. Sementara Indonesia memiliki rasio di bawah 5% pada tahun 1960-an dan trennya meningkat di awal tahun 1990-an yang kemudian mencapai puncaknya di awal tahun 2000-an dengan rasio tertinggi 16%. Rasio ini kemudian mengalami penurunan yang sistematis pada pertengahan tahun 2000-an menuju rasio 5% .

Grafik 4. *High-Technology Exports (percentage of manufactured exports)*
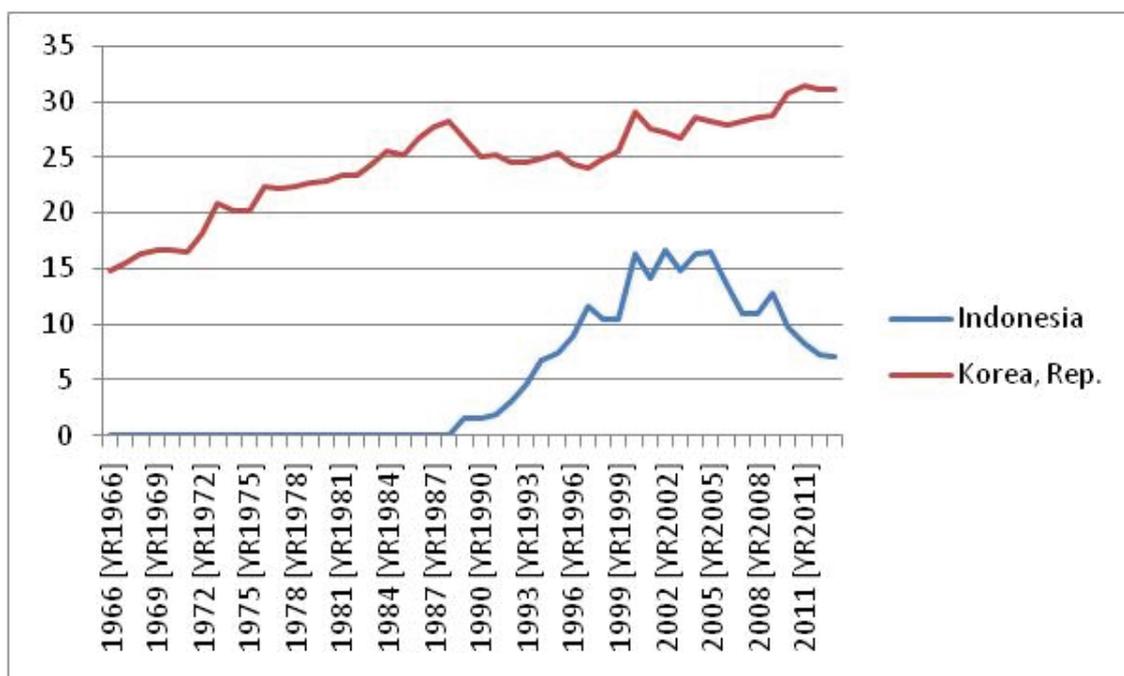
Sumber: *World Development Indicator 2015*

Eichengreen, Park, and Shin (2012, 2013) sudah mewanti-wanti bahwa lemahnya rasio ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi negara berpendapatan menengah manapun untuk mampu melewati perangkap pendapatan menengah yang mengerikan itu. Ini juga secara implisit memperlihatkan bahwa secara relatif Indonesia belum berlimpah akan tenaga kerja yang memiliki pendidikan tertiery dalam industri *aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery*. Dipastikan jumlahnya di Indonesia terus meningkat tetapi kalah cepat dengan peningkatan jumlah yang terjadi di Korea Selatan. Secara kualitas juga dipastikan masih tertinggal. Hal ini juga tercermin dari *school enrollment ratio* untuk *tertiery education* di Indonesia yang jauh tertinggal dari Korea Selatan. Dari sisi perkembangan nilai ekspor terlihat bahwa kesenjangan kinerja ekspor teknologi tinggi antara Korea Selatan dan Indonesia terus semakin melebar. Secara nilai ekspor kinerja ekspor teknologi tinggi Indonesia boleh dikatakan berjalan di tempat pada kinerja ekspor yang sangat rendah sekali (Grafik 5).

Daya saing yang tinggi dari perekonomian Korea Selatan dan lemahnya daya saing perekonomian Indonesia juga tercermin dari perkembangan *current account balance*-nya (lihat Grafik 6 dan 6.a) dimana Korea Selatan semakin mencetak angka surplus dan Indonesia semakin mencetak angka defisit. Kondisi ini semakin memperlihatkan bahwa strategi pembangunan ekonomi Indonesia harus berputar 180 derajat untuk menghindar dari perangkap pendapatan menengah. Indonesia harus mampu melakukan transformasi perekonomian menuju sektor manufaktur yang berbasis keahlian yang tinggi dan kreatifitas yang juga merubah neraca berjalan (*current account balance*) Indonesia menjadi positif.

Salah satu faktor lain yang berpotensi membuat negara berpendapatan rendah terperangkap dalam pendapatan menengah adalah jika negara tersebut terlalu sering melakukan depresiasi mata uangnya dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor produk dengan upah murah karena gagal melakukan transformasi pembangunan dengan menciptakan produk eskpor yang berbasis keahlian yang tinggi (Eichengreen, Park, and Shin (2012, 2013)). Indonesia melakukan depresiasi mata uangnya (rupiah) baik selama Orde Lama, Orde Baru dan Orde Reformasi. Pada tahun 1960 nilai rupiah terhadap dolar Amerika adalah 0,075, kemudian melemah menjadi 4 pada tahun 1965. Pada tahun 1998 nilainya menjadi 10.013 rupiah per dolar yang menguat menjadi 8.770,4 rupiah per dolar pada tahun 2011. Mata uang Korea Selatan juga mengalami pelemahan dalam periode observasi yang sama. Namun secara netto, pelemahan rupiah terjadi secara masif jika dibandingkan dengan won. Dengan menggunakan rasio nilai tukar rupiah terhadap dolar dibandingkan dengan won terhadap dolar maka akan diperoleh nilai rupiah terhadap won yang memperlihatkan pelemahan rupiah secara sistematis dari 0,005738731 rupiah per won di tahun 1964 menjadi 7,91345212 di tahun 2011. Lihat Grafik7.Won sendiri mengalami depresiasi terhadap dolar Amerika dari 63,13 won per dolar di tahun 1960 menjadi 1.108,3 won per dolar di tahun 2011.

Peluang Indonesia masih ada karena struktur penduduk Indonesia belum membuat penduduk tua menjadi beban pembangunan (lihat Grafik 8). Bahkan dibandingkan Korea Selatan yang sudah cenderung menjadi populasi dengan penduduk tuanya yang meningkat hampir mencapai 18% , Indonesia baru akan mencapai 8% . Namun tentunya hal ini juga harus disertai dengan kualitas sumber daya manusia yang semakin tinggi. Jika kualitas sumber daya manusia tidak dapat diperbaiki dalam tempo yang secepatnya maka peluang ini akan menguap.

Grafik 5. *High-Technology Exports (current US$)*
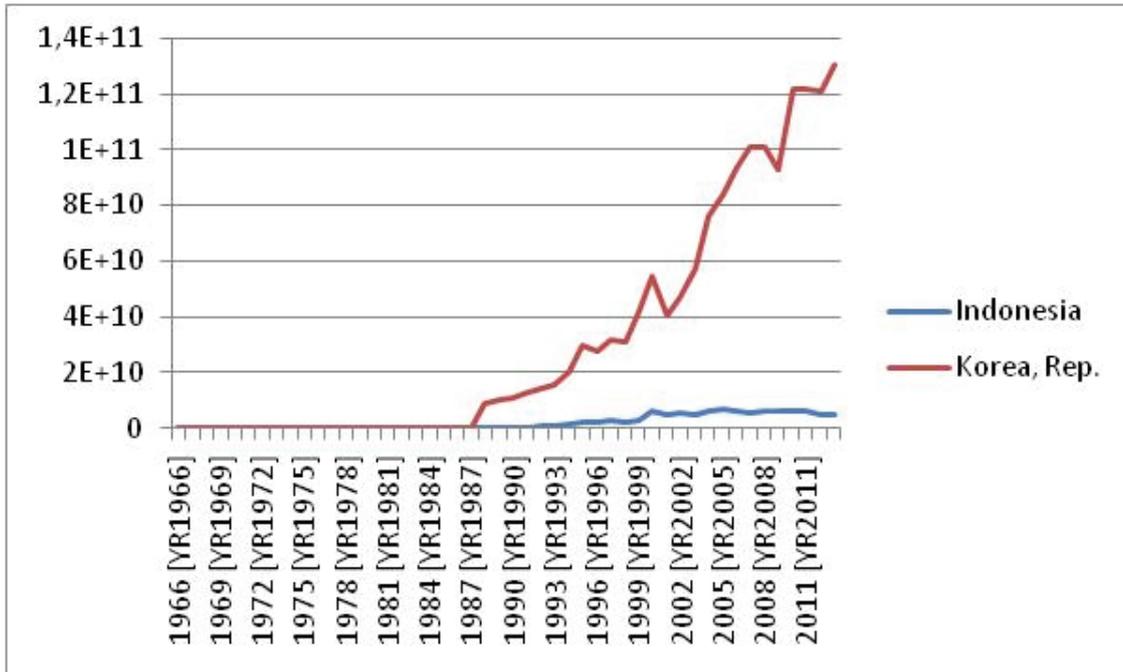
Sumber: *World Development Indicator 2015*

Grafik 6. *Current Account Balance (current US$)*
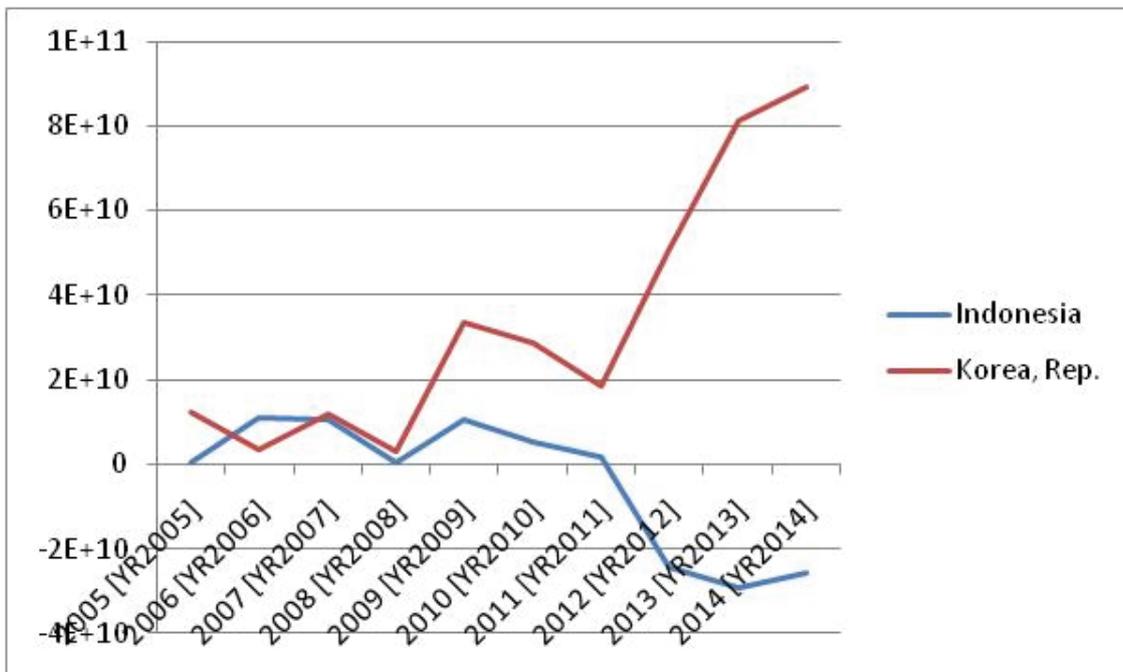
Sumber: *World Development Indicator 2015*

Grafik 6a. *Current Account per GDP (in Percent).*
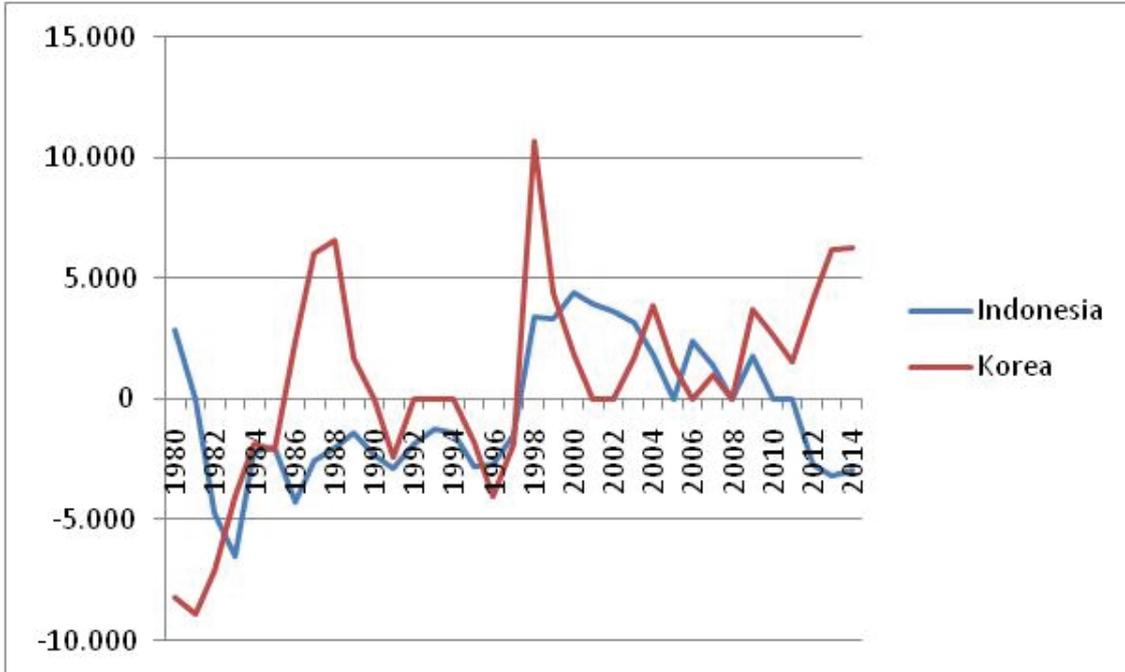
Sumber: *World Economic Outlook 2015 Data Base.*

Grafik 7. Perkembangan depresiasi nilai tukar Rupiah terhadap Won
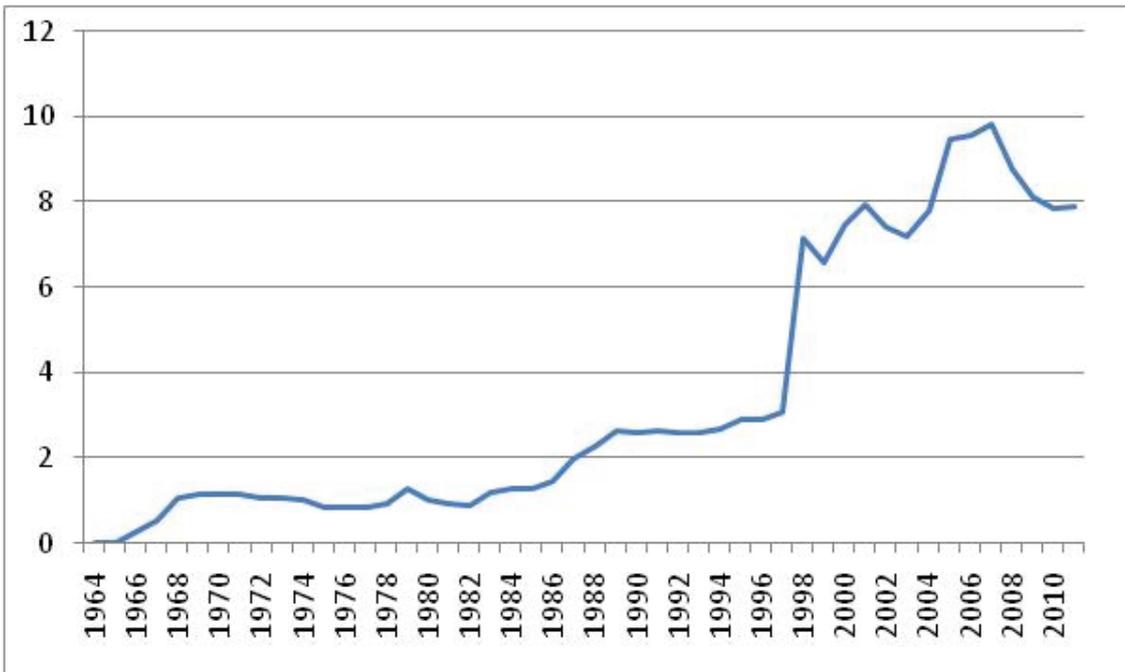
Sumber: Diolah dari data Tabel Penn World (PWT) 8.1
(Feenstra, Inklaar and Timmer 2015)

Grafik 8. *Age Dependency Ratio, Old (% of working-age population)*
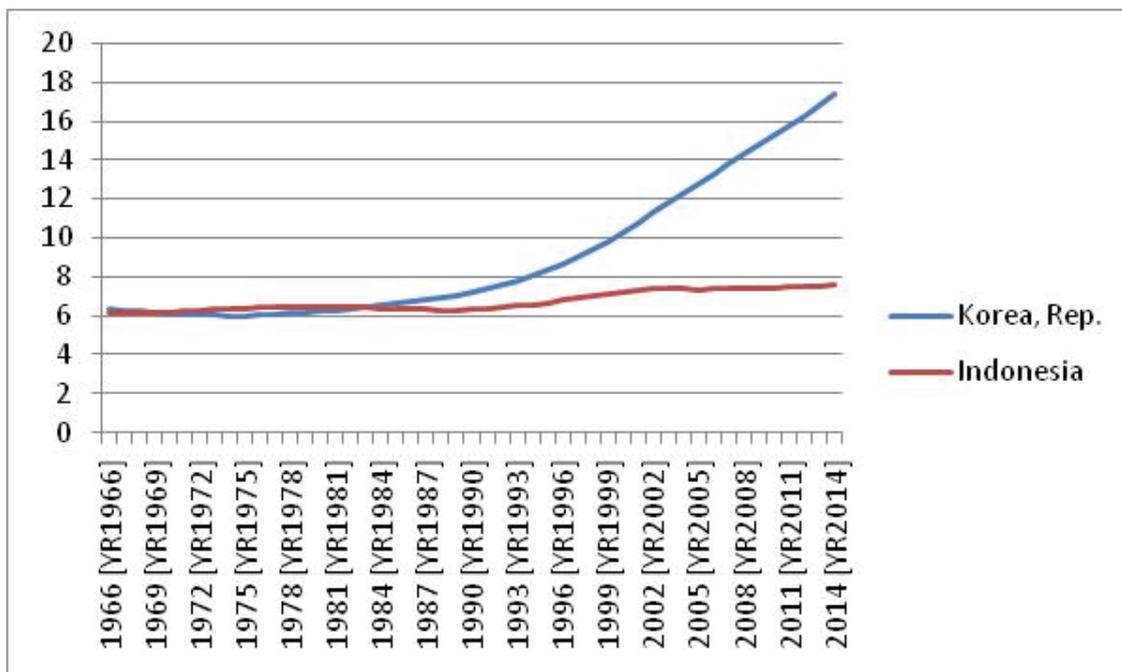
Sumber: *World Development Indicator 2015*

Ancaman Serius Kepincangan Pendapatan dan Kondisi Kesejahteraan Perkerja

Ketimpangan pendapatan merupakan indikator yang sangat serius untuk melihat apakah Indonesia akan mampu melewati perangkap pendapatan memengah ataupun rendah. Taiwan dan Korea Selatan secara relatif merupakan negara yang ketimpangan kekayaannya tidak buruk. Rodrik (1994) mengatakan: *"In Korea and Taiwan, unlike in so many other developing countries, these additional requirements were present. Why? One important factor was clearly the availability of relatively skilled labour, enabling the formation of a competent bureaucracy. In addition, an exceptionally high degree of equality in income and wealth - one of the other initial conditions mentioned earlier - was important as well. How exacdy did the latter help? The absence of large inequities meant several things (Page 91-92).*

Ia melanjutkan dengan manfaat pertama dari negara yang perekonomiannya tidak pincang: *"First, neither govemment had to contend with powerfiil industrial orlanded interest groups. Such powerful groups had been decimated by the Japanese occupation (Korea), the settlement by the mainland Chinese (Taiwan), and land reform (both countries). Therefore, policy making and implementation could be insulated from pressure group politics. In both countries, the implementation of growth-oriented policies required a number of institutional reforms, including the centralization of functions previously distributed among multitudes of ministries and agencies, and the creation of new bureaucracies. These institutional reforms*

Grafik 9. Kepincangan Gini Rasio di Indonesia
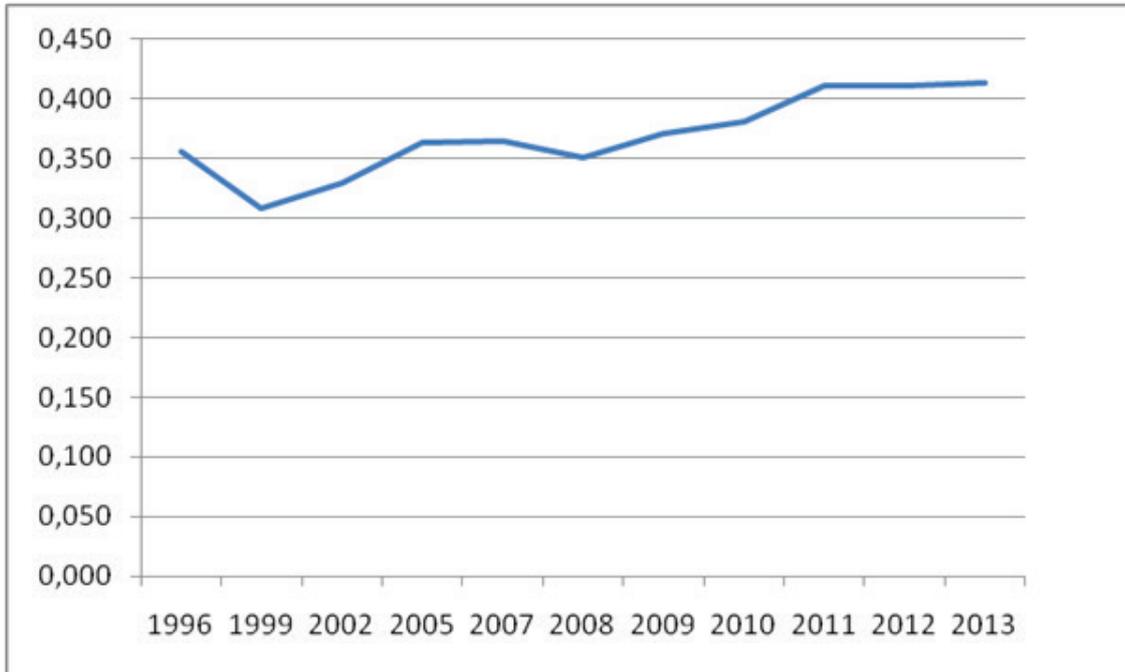
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015. BPS.

could be undertaken relatively autonomously, and with litde pressure from the push and pull of daily politics. Economic laws and regulations could be written by technocratic elites, with litde concern for their effect on organized pressure groups."

Selanjutnya ia menambahkan: *"Second, the absence of large-scale inequities meant that governments felt no immediate need to undertake redistributive policies. The analytical literature on the political economy of growth suggests that regimes which inherit large inequalities are constandy under pressure to implement growth-retarding policies An example is the pursuit of populist fiscal and microeconomic policies (as in much of Latin America) which engender high inflation, stop)—go cycles and low growth. The political leadership in Taiwan and Korea could concentrate on expanding the pie instead."*

Terakhir ia mengakhiri pentingnya perekonomian yang tidak pincang kesejahteraannya bagi suksesnya kebijakan industri: *"Third, and related to the above, the fact that the top political leaders were free tofocus on economic goals meant that they could supervise the bureaucracy closely. This is important because interventionist regimes are prone to two fatal problems having their origin in the bureaucracy. The first is that interventions naturally generate opportunities for rent seeking. A weak or poorly supervised bureaucracy is incapable of reining in rent seeking (or becomes part of it). A strong bureaucracy, on the other hand, can choke off entrepreneurial incentives by sticking too closely to the letter of the law and imposing too many cumber some restrictions aimed at rooting out rent seeking. In both Taiwan and Korea, the top political*

leaders closely monitored the bureaucracy to make sure that the bureaucrats assisted rather than hindered private entrepreneurship. President Park, in particular, was famous for his daily involvement in the impilementation of his economic policies, and his willingness to override the bureaucracy at a moment's notice when businessmen had legitimate complaints".

Hal yang tidak berbeda juga diungkapkan oleh Booth (1999). Bahkan bukan hanya itu tetapi Booth juga mengatakan bahwa Korea Selatan dan Taiwan secara relatif tidak mengalami kepincangan pendapatan dibandingkan dengan Thailand, Malaysia dan Indonesia. Ia mengatakan: *"The last significant point of difference between the North East Asian and the South East Asian experiences of accelerated economic growth concerns the distributional outcomes. I have already emphasised that an important part of the colonial legacy in South East Asia were the substantial income disparities between urban and rural areas, between regions and between ethnic groups, which persisted in the immediate post-independence era. Most countries in the region embarked on a process of accelerated growth after 1960 with greater income differentials than in South Korea or Taiwan".*

Gambar 1 memperlihatkan koefisien gini antara Indonesia, Taiwan dan Irlandia tahun 2010 dimana Taiwan dan Irlandia sudah mencapai produk domestik bruto yang secara relatif tinggi dengan kebijakan industri. Taiwan menggunakan kekuatan investasi domestik dan Ireland memakai *Foreign Direct Investment*.

Gambar 1. Koefisien Gini 2010
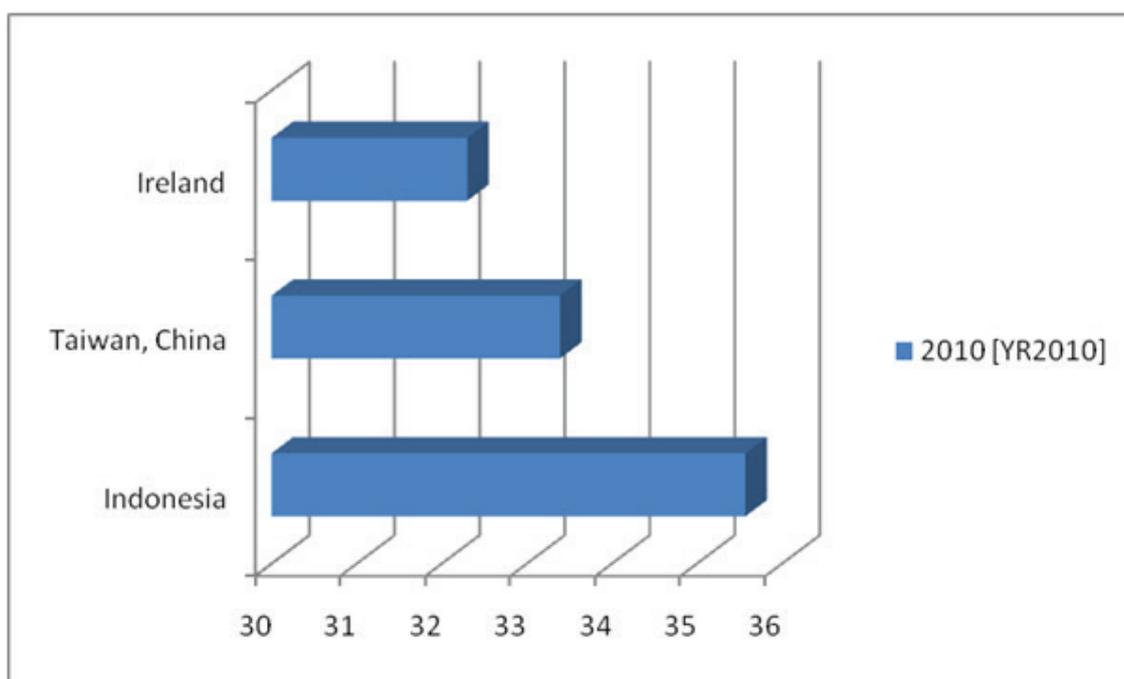
Sumber: World Development Indikator 2015.

Berbeda dengan Korea Selatan dan Taiwan, ketimpangan pendapatan di Indonesia terus memperlihatkan kecenderungan yang memburuk (lihat Grafik 8). Indonesia menghadapi kondisi yang lebih sulit ketimbang Korea Selatan dan Taiwan agar tidak terperangkap dalam krisis pendapatan menengah maupun rendah karena buruknya ketimpangan kekayaan. Lebih dari itu, angka gini koefisien bahkan sudah melebihi batas yang dianggap aman. Gini Koefisien Indonesia terus memburuk mulai krisis ekonomi tahun 1998 hingga saat ini. Dari tahun 1999 yang memiliki rasio gini 0,355 meledak menjadi 0,413 di tahun 2013. Rasio tersebut sudah menembus angka 0,40 semenjak tahun 2011 di pemerintahan SBY. Perkembangan rasio gini pada tahun 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 dan 2013 masing-masing secara berurutan adalah 0,364, 0,35, 0,37, 0,38, 0,41 0,41 dan 0,413. Artinya gini koefisien telah mengalami pemburukan yang sangat serius. Selama periode 1999 hingga 2013 telah terjadi pemburukan sebesar 34,1%. Krisis ekonomi 1998 terbukti membuat perekonomian Indonesia semakin pincang dalam distribusi pendapatan. Perlu diingat bahwa angka-angka ini berasal dari perhitungan Badan Pusat Statistik yang menggunakan data susenas dengan pendekatan pengeluaran. Artinya, kepincangan pendapatan yang sesungguhnya akan lebih besar ketimbang yang telah dihitung oleh BPS di atas. Selain data susenas hanya data Indonesia *Family Life Survei* (IFLS) yang dapat digunakan untuk menghitung koefisien gini di Indonesia. Dengan data IFLS, menurut perhitungan Fields *et al*. (2003: 73) koefisien gini Indonesia pada tahun 1993 dan 1997 adalah 0.56. Semenjak Orde Baru Indonesia sudah mengalami kepincangan pendapatan yang sangat parah.

Masih berdasarkan data BPS, kepincangan pendapatan di perkotaan dan pedesaan sama-sama mengalami kondisi yang terus memburuk hanya saja memang kondisi di perkotaan secara relatif jauh lebih buruk lagi. Kondisi kepincangan pendapatan di pedesaan pada periode tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 masing-masing secara berurutan adalah 0.27, 0.28, 0.3, 0.3, 0.29, 0.32 dan 0.34. Artinya kepincangan pendapatan menjadi semakin buruk sebesar 25.9% selama periode tersebut. Sementara kondisi distribusi pendapatan di perkotaan pada periode tahun 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 dan 2011 masing-masing secara berurutan adalah 0.32, 0.35, 0.37, 0.37, 0.37, 0.38 dan 0.42. Berarti kepincangan pendapatan di perkotaan selama periode ini mengalami pemburukan sebesar 31.25%. Hal ini dapat terjadi karena pekerja di sektor perkotaan terperangkap dalam sektor jasa dan bukan sektor manufaktur. Implikasinya upah mereka murah, sulit menjadi anggota serikat pekerja dan tak menikmati upah minimum. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi negara ASEAN lainnya. Booth (1999, Page 34) mengatakan: *"But the high urbanrural income disparities common in South East Asia suggest a rather different explanation.Many people stay in rather poorly remunerated agricultural jobs because they doubt that they can find non-agricultural employment, and those that do move into non-agricultural jobs tend to find them in services rather than manufacturing. It is striking that a considerably higher proportion of non-agricultural employment in Indonesia, Thailand, Malaysia and the Philippines was in services compared with Taiwan, South Korea and Japan at similar levels of income."*

Di Indonesia sektor manufaktur memiliki upah yang lebih tinggi dari sektor jasa yang nilainya juga lebih tinggi dari upah minimum. Rasio rata-rata upah buruh manufaktur terhadap upah minimum terus mengalami penurunan dari 1,84 di tahun 2004 menjadi 1,42 di tahun 2010. Rasio rata-rata upah buruh perhotelan terhadap rata-rata upah minimum juga mengalami penurunan dari 1,65 tahun 2004 menjadi 1,29 pada tahun 2010. Rasio rata-rata upah buruh sektor pertambangan non minyak terhadap upah minimum relatif konstan dari 3,57 tahun 2004 menjadi 4,10 tahun 2010. Problem kesejahteraan buruh lainnya adalah masih tingginya rasio antara kebutuhan fisik minimum seorang buruh dibandingkan dengan upah minimumnya dimana pada tahun 2004 rasionya adalah 1,08 dan pada tahun 2008 adalah 1,13. Artinya upah minimum tidak mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum seorang buruh.

Rasio rata-rata upah pekerja terhadap upah minimum akan terus mengalami penurunan di masa depan. Tren penurunan itu terjadi secara jelas dimana pada tahun 2004 rasionya adalah 1,59 dan terus menurun menjadi 1,29 di tahun 2008, 1,31 di tahun 2009 serta 1,33 di tahun 2010. Artinya secara rata-rata pekerja mengalami penurunan kesejahteraan secara sistematis. Perkembangan rasio upah buruh sektor manufaktur dan sektor perhotelan terhadap upah minimum diperkirakan akan terus semakin mengecil di masa depan. Kedua rasio tersebut memperlihatkan tren yang terus menurun sejak tahun 2004 sementara pertumbuhan ekonomi secara relatif justru memperlihatkan peningkatan dalam periode yang sama. Artinya pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi tidak memberikan tambahan kesejahteraan bagi buruh di kedua sektor tersebut. Bukannya tidak mungkin rasio rata-rata upah manufaktur terhadap upah minimum serta rasio rata-rata upah perhotelan terhadap upah minimum akan mencapai angka satu atau bahkan di bawah satu dalam beberapa tahun ke depan. Sementara rasio upah minimum terhadap kebutuhan hidup minimum tampaknya juga masih akan di bawah satu untuk beberapa tahun ke depan. Buruh sektor pertambangan non minyak memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik ketimbang buruh di sektor manufaktur dan perhotelan dimana rasio rata-rata upah mereka terhadap upah minimum pada tahun 2004 saja mencapai 3,57 kali dan pada tahun 2010 mencapai di atas 4,1 kali. Bahkan pada tahun 2007 mencapai 5,19 kali kemudian menurun menjadi 3,71 kali di tahun 2008 dan 3,06 kali di tahun 2009 yang tentunya tidak lepas dari pengaruh krisis perekonomian di negara maju khususnya Amerika Serikat. Namun pada tahun 2010 rasio kembali meningkat menjadi 4,1 kali yang memperlihatkan permintaan akan barang tambang non minyak masih tetap tinggi. Sementara rasio upah sektor manufaktur terhadap upah minimum pada tahun 2004 adalah 1,84 kali dan terus meluncur turun menjadi 1,42 kali di tahun 2010 bahkan sebelumnya pada tahun 2009 mencapai 1,37 kali. Sementara rasio upah sektor perhotelan terhadap upah minimum meluncur lebih deras lagi dari 1,65 kali di tahun 2004 menjadi 1,29 kali di tahun 2010. Buruh manufaktur dan perhotelan akan menghadapi kehidupan yang semakin sulit di masa depan.

Berdasarkan tingkat pendidikan maka rasio buruh yang tidak berpendidikan memiliki rasio rata-rata upah terhadap upah minimum yang semakin buruk dan di bawah satu dimana rasio

pada tahun 2004 adalah 0,64 dan tahun 2010 adalah 0,51. Sementara rasio rata-rata upah buruh yang pendidikannya tidak tamat sekolah dasar terhadap upah minimum pada tahun 2004 adalah 0,78 dan pada tahun 2010 adalah 0,68. Sedangkan rasio rata-rata upah buruh yang tamat sekolah dasar terhadap upah minimum pada tahun 2004 adalah satu dan terus menurun menjadi 0,78 pada tahun 2010. Dengan demikian di masa depan buruh dengan tingkat pendidikan sekolah dasar ke bawah tren rasionya bukan saja memburuk tetapi juga sudah di bawah upah minimum. Upah rata-rata pekerja dengan pendidikan sekolah menengah pertama umum juga cenderung akan terus memburuk di masa depan dimana upah pada tahun 2004 adalah 1,3 dan pada tahun 2010 adalah 1,14. Tren yang sama juga berlaku bagi pekerja dengan pendidikan sekolah menengah atas terhadap upah minimum namun dengan rasio yang sedikit lebih baik di bandingkan dengan tingkatan pendidikan sebelumnya dengan rasio 1,93 di tahun 2004 dan 1,48 di tahun 2010. Rasio rata-rata upah buruh berpendidikan sekolah menengah atas kejuruan terhadap upah minimum juga memiliki kecenderungan yang terus turun di masa depan dimana rasionya pada tahun 2004 adalah 2,02 menjadi 1,52 di tahun 2010. Pekerja dengan pendidikan diploma tiga tahun juga cenderung menghadapi penurunan rasio rata-rata upahnya terhadap upah minimumnya dari rasio 3,03 di tahun 2004 menjadi 2,13 di tahun 2010. Penurunan rasio ini juga dialami oleh pekerja dengan pendidikan sarjana dengan rasio pada tahun 2005 sebesar 3,04 menjadi 2,84 di tahun 2010. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan yang selama ini berjalan dan juga yang akan datang telah dan akan menyebabkan kesejahteraan buruh menjadi semakin buruk. Turunnya rasio upah terhadap upah minimum ini salah satunya akibat masuknya pekerja dalam kategori lowongan pekerjaan yang rentan (*vulnarable employment)* ke dalam pasar tenaga kerja.

Vulnerable employment is unpaid family workers and own-account workers as a percentage of total employment juga memperlihatkan kecenderungan yang membaik (lihat Gambar 2). Mereka secara mayoritas diperkirakan masuk ke dalam sektor jasa dengan upah yang murah dan bukan sektor manufaktur sehingga semakin menekan upah buruh. Lihat juga Booth (1999, Page 34).

Pada tahun 2011, empat provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terburuk secara berurutan adalah Papua (31,98%), Papua Barat (31,92%), Maluku (23%) dan Nusa Tenggara Timur (21,23%). Sedangkan pada tahun 2006, empat provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin terburuk secara berurutan adalah Papua (41,52%), Papua Barat (41,34%), Maluku (33,03%) dan Nusa Tenggara Timur (29,34%). Ironisnya, semenjak tahun 2011 hingga 2013, Papua dan Papua Barat juga merupakan propinsi dengan rasio gini di atas 40%.

Booth (1999) sudah mengingatkan bahwa ketimpangan kekayaan yang buruk terjadi di daerah yang sesungguhnya kaya akan kekayaan alam dan kondisi ini membuka peluang bagi gerakan separtisme. Sungguh sulit melakukan pembangunan ekonomi yang memerlukan

Gambar 2. *Vulnerable employment, total (% of total employment)*
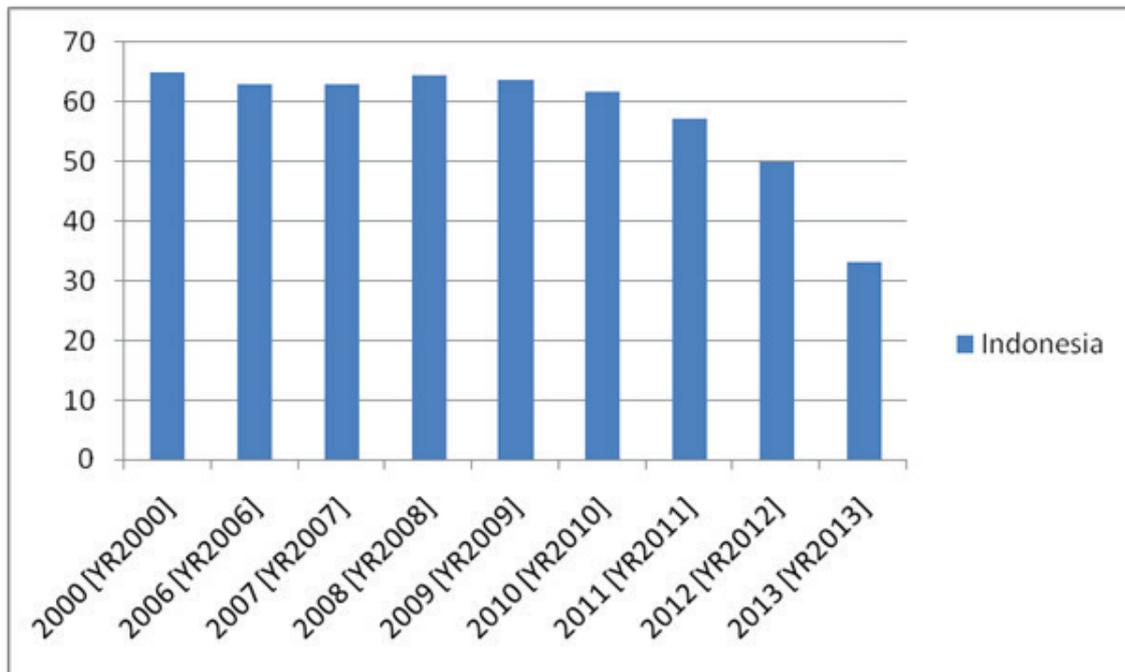
Sumber: International Labour Organization, Key Indicators of the Labour Market database. *World Development Indicator 2015.*

komitmen investasi jangka panjang jika faktor keamanan tidak lagi dapat dikendalikan. Booth (1999) mengatakan: *"But large income disparities can have destabilising effects. In both Malaysia and Indonesia, there are very considerable regional disparities in poverty, and some resource-rich regions such as Sabah in East Malaysia, and Irian Jaya in Eastern Indonesia have high incidences of poverty relative to the national average. This is partly due to the system of resource taxation which drains a large part of the profits from exploitation of minerals and timber off to the centre (Booth 1996: 199-202). In the longer run such a system is bound to fuel regional tensions, and even lead to separatist movements".*

Ancaman bagi rendahnya pertumbuhan ekonomi dari daerah yang kepincangan kekayaannya tinggi juga dibuktikan secara empiris dengan data *cross section* antar negara oleh Alesina and Rodrik (1994: 485) yang mengatakan secara konkrit hasil penemuannya yaitu: *"Inequality in income and land distribution is negatively associated with subsequent growth".*

Artinya semakin pincang pendapatan atau kekayaan dalam masyarakat maka semakin besar potensi penurunan dalam pertumbuhan ekonomi. Sebuah signal serius bagi Indonesia yang berupaya untuk menghindar dari perangkap pendapatan menengah dan rendah.

Hingga tahun 2013, sudah ada sepuluh propinsi yang memiliki angka rasio gini di atas 10% (lihat Grafik 10). Ini merupakan ancaman yang sangat serius bagi Indonesia agar selamat

dari perangkap pendapatan menengah dan rendah. Menarik melihat persentase kemiskinan di propinsi-propinsi pulau Jawa karena Jawa secara relatif memiliki infrastruktur yang lebih baik dengan daerah di luar pulau Jawa namun persentase kemiskinan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta dan Jawa Timur masih lebih tinggi dari misalnya propinsi-propinsi di Kalimantan pada tahun 2011. Terbukti bahwa keberadaan infrastruktur yang cukup berlimpah secara relatif gagal menurunkan kemiskinan padahal Bank Dunia lebih memfokuskan pembangunan sektor infrastruktur agar Indonesia terlepas dari ancaman perangkap pendapatan menengah. Masalahnya Jawa merupakan basis industri di Indonesia dan dengan semakin melemahnya sektor industri maka pekerja di propinsi ini akan mengalami dampak langsung negatifnya.

Grafik 10. Provinsi dengan Gini Rasio di atas 40 persen di tahun 2013
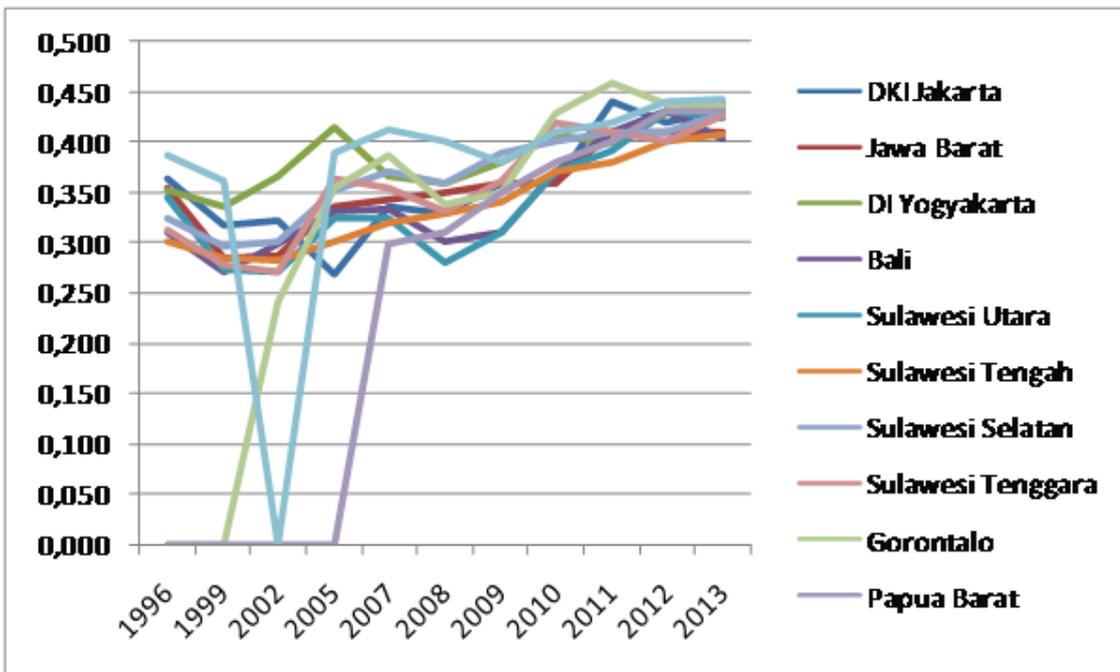
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015. BPS.

Dengan menggunakan data *Indonesia Family Life Survey* tahun 1993, 1997 dan 2000, perangkap kemiskinan antar generasi di Indonesia adalah 35% artinya seorang anak yang lahir dari keluarga yang sangat miskin akan memiliki probabilitas untuk tetap miskin sebesar ketika dewasa sebesar 35% di bandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang tidak miskin. Ini merupakan ironi karena program sekolah gratis hingga sembilan tahun tidak memiliki efek positif untuk menurunkan probabilitas kemiskinan karena orang tuanya miskin. Ini secara tidak langsung juga memperlihatkan akan buruknya kualitas pendidikan di Indonesia.

Propinsi yang memiliki rasio gini di bawah 40% memang secara relatif masih mayoritas, namun trennya juga memperlihatkan pemburukan dimana kepincangan terus terjadi sehingga secara tren tampaknya tinggal menunggu waktu bagi propinsi di Sumatera yang masih memiliki

Grafik 11. Provinsi di Sumatera dengan Rasio Gini di bawah 40 persen
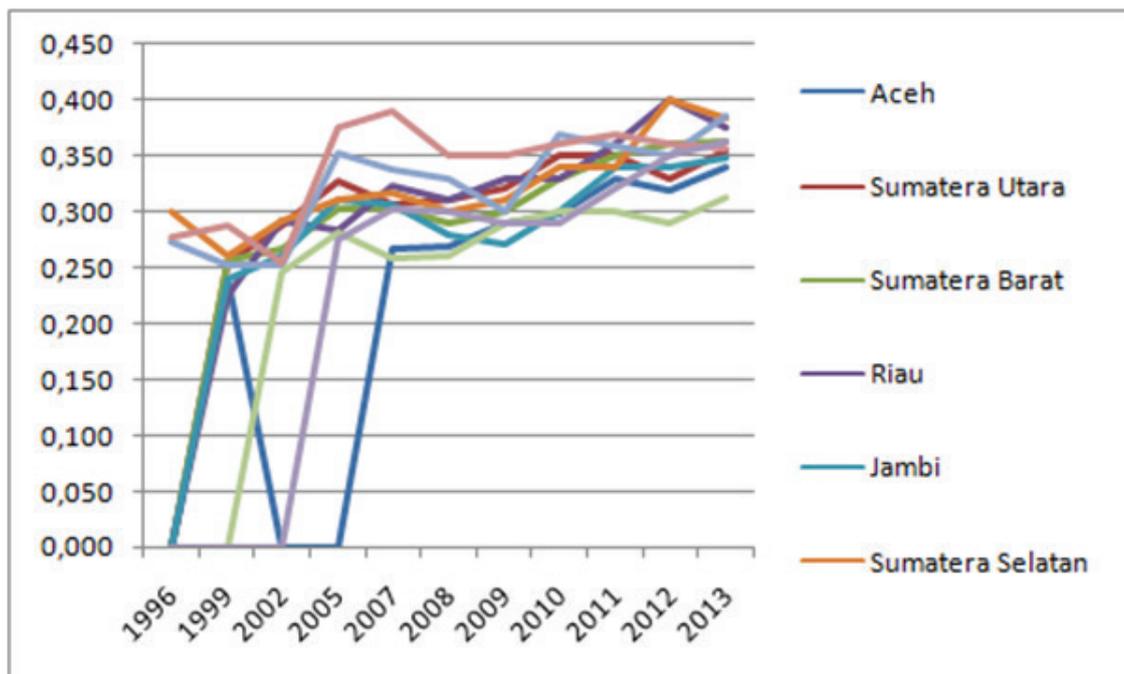
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015. BPS.

Grafik 12. Provinsi di Jawa dengan Rasio Gini di bawah 40 persen
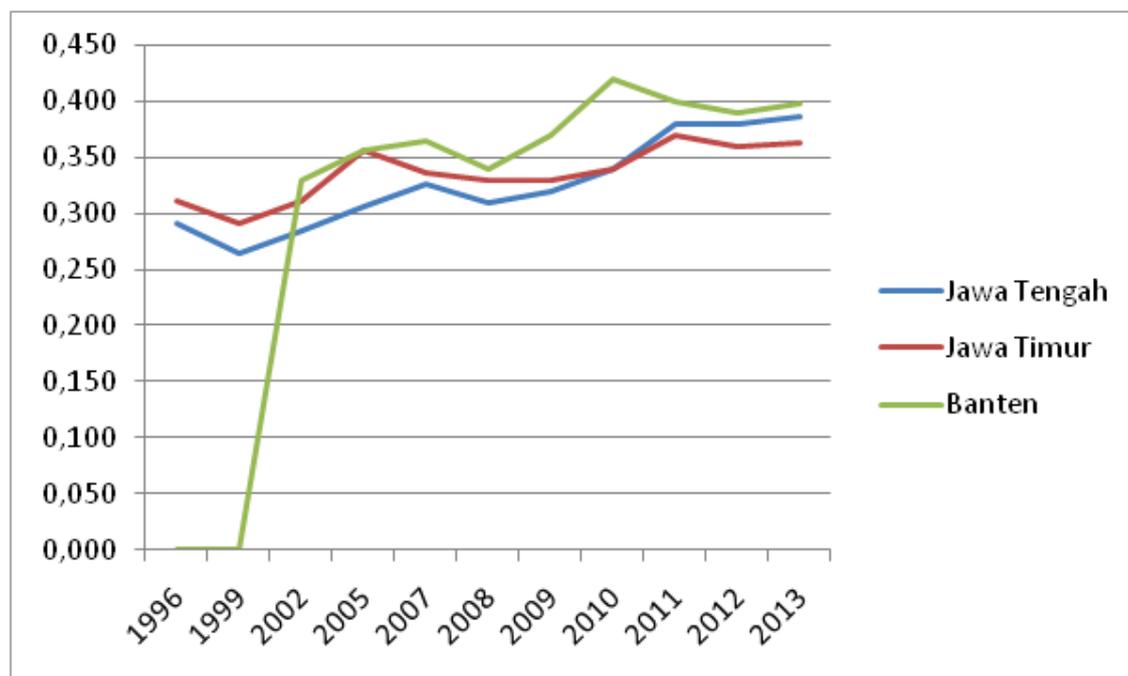
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015. BPS.

Grafik 13. Provinsi di Nusa Tenggara dengan Rasio Gini di bawah 40 persen
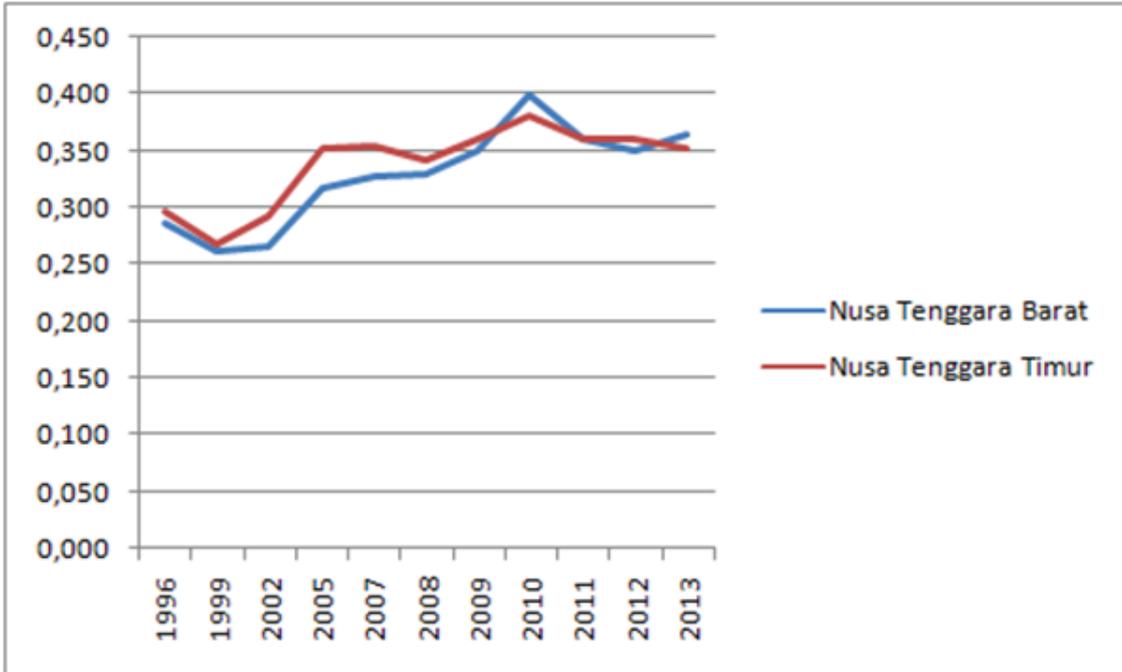
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015. BPS.

Grafik 14. Provinsi di Kalimantan dengan Rasio Gini di bawah 40 persen
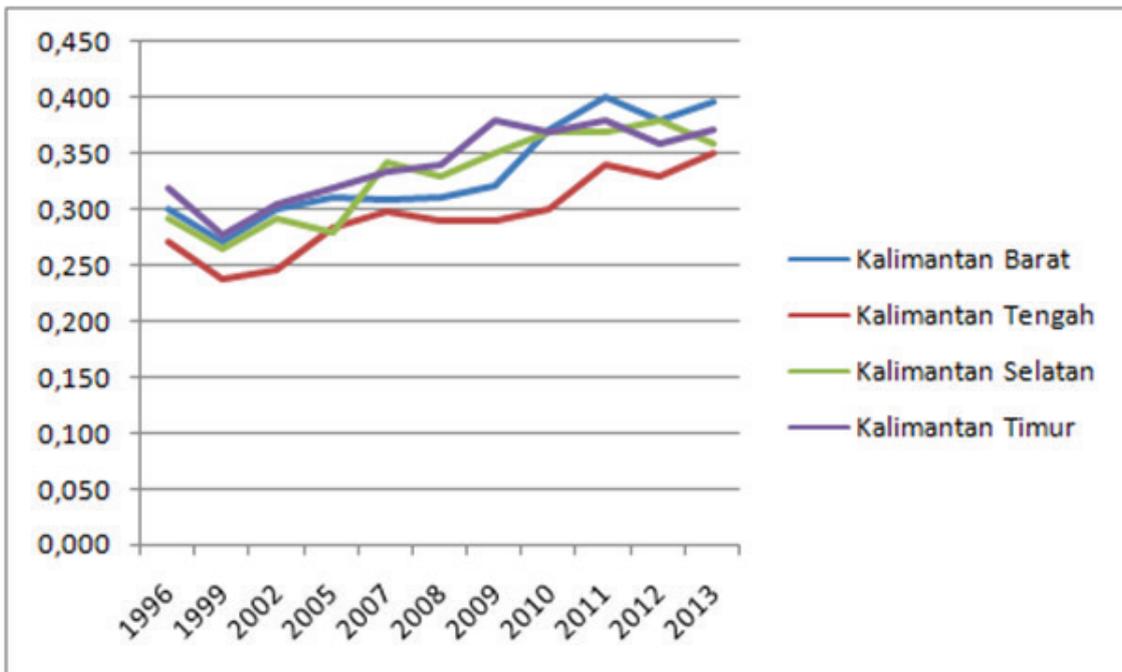
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015. BPS.

Grafik 15. Provinsi di Sulawesi dengan Rasio Gini di bawah 40 persen
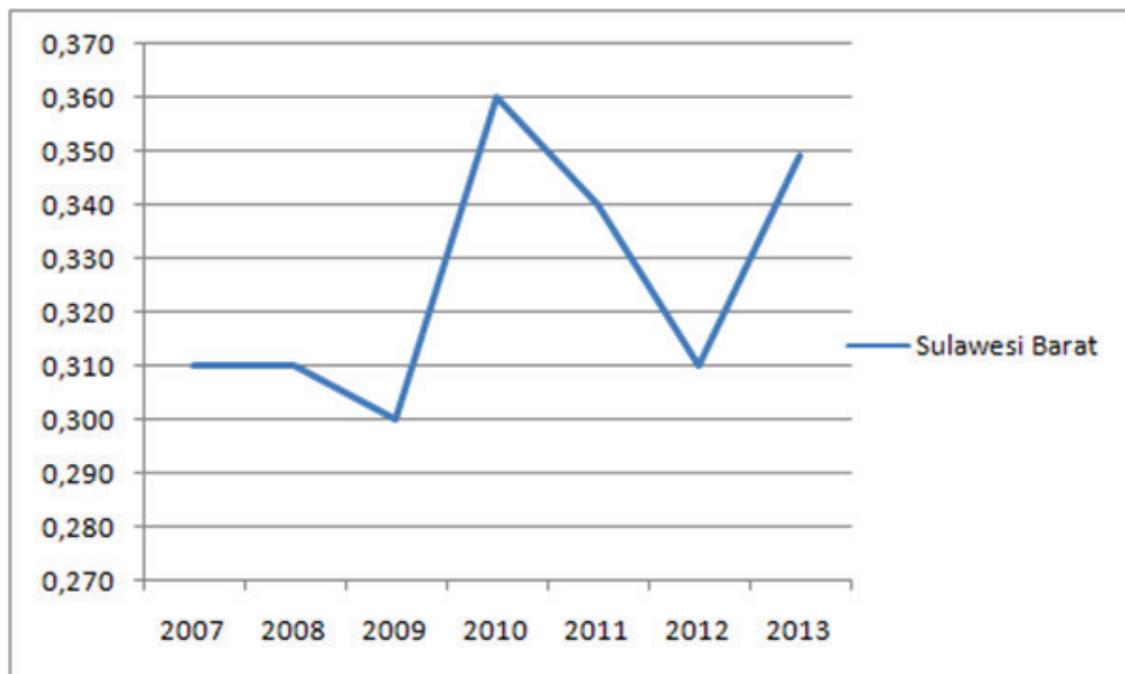
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015. BPS.

Grafik 16. Provinsi di Maluku dengan Rasio Gini di bawah 40 persen
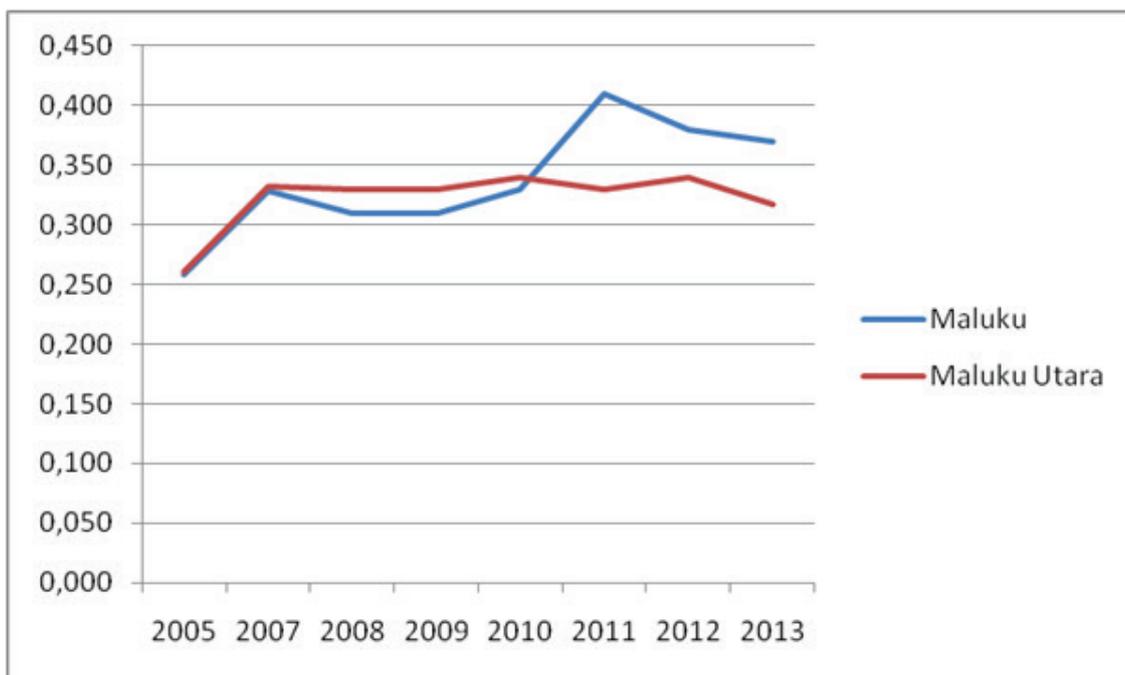
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat 2015. BPS.

rasio gini di bawah 40% untuk mencapai angka 40% dalam waktu dekat ini (lihat Grafik 11). Kenderungan memburuk yang sama dalam kepincangan pendapatan juga berlaku bagi propinsi di Jawa yang memiliki rasio gini di bawah 40% (lihat Grafik 12) dan juga Kalimantan (Grafik 14).

Sementara itu propinsi sisanya yaitu Nusa Tenggara (Grafik 13), Sulawesi (Grafik 15) dan Maluku (Grafik16) memiliki slope pemburukan rasio gini yang secara relatif lebih landai. Namun demikian, Nusa Tenggara dan Maluku tampaknya ada kecenderungan terus memburuk yang patut diperhatikan.

Pekerjaan Rumah Pemerintah versus Kegagalan Pasar

Pemerintah Joko Widodo baru saja setahun memerintah dengan mewarisi fondasi perekonomian Indonesia yang secara relatif bukanlah foundasi semewah perekonomian yang memiliki kinerja yang primadona seperti Korea Selatan. Namun demikian pemerintah sudah memiliki niat baik dengan menggulirkan Sembilan Program yang dikenal dengan istilah Nawacita. Nawacita ini cocok sebagai landasan untuk menciptakan kebijakan industri di Indonesia yang berkelanjutan. Isinya adalah:

1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara, melalui politik luar negeri bebas aktif, keamanan nasional yang terpercaya dan pembangunan pertahanan negara Tri Matra terpadu yang dilandasi kepentingan nasional dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
2. Membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya, dengan memberikan prioritas pada upaya memulihkan kepercayaan publik pada institusi-institusi demokrasi dengan melanjutkan konsolidasi demokrasi melalui reformasi sistem kepartaian, pemilu, dan lembaga perwakilan.
3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
4. Menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia melalui peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan dengan program "Indonesia Pintar"; serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan program "Indonesia Kerja" dan "Indonesia Sejahtera" dengan mendorong *land reform* dan program kepemilikan tanah seluas 9 hektar, program rumah kampung deret atau rumah susun murah yang disubsidi serta jaminan sosial untuk rakyat di tahun 2019.
6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
8. Melakukan revolusi karakter bangsa melalui kebijakan penataan kembali kurikulum pendidikan

nasional dengan mengedepankan aspek pendidikan kewarganegaraan, yang menempatkan secara proporsional aspek pendidikan, seperti pengajaran sejarah pembentukan bangsa, nilai-nilai patriotisme dan cinta tanah air, semangat bela negara dan budi pekerti di dalam kurikulum pendidikan Indonesia.

9. Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.

Program nomor satu hingga sembilan jika dijalankan secara serius akan mampu mengubah arah pembangunan Indonesia dengan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat, pendidikan masyarakat dan sektor manufaktur yang tangguh. Program nyata yang telah dijalankandalam bidang pendidikan adalah wajib belajar 12 tahun. Dengan kebijakan ini diperkirakan rasio pendaftaran sekolah untuk pendidikan menengah akan membaik walaupun secara kualitas pendidikan belum dijamin membaik karena belum terlihat paket kebijakan yang mendorong peningkatan kualitas pendidikan. Padahal kualitas pendidikan sangatlah *urgent* untuk diperbaiki sedini mungkin.

Dalam bidang industri, paket kebijakan yang sudah keluar adalah pemangkasan izin investasi kawasan industri menjadi hanya tiga jam, pemangkasan 14 izin di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta upah buruh naik setiap tahun dengan mempertimbangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Paket industri yang terkait dengan perdagangan adalah pengembangan kawasan ekonomi khusus di delapan wilayah serta penyederhanaan impor bahan baku sera makanan secara online. Kebijakan energi yang terkait dengan industri adalah penurunan harga solar dan penurunan tarif listrik.

Sayang dalam hal kebijakan upah yang baru upaya ini bertentangan dengan filosofi tri parti dalam negosiasi upah sehingga yang merupakan konvensi ILO yang juga ditandatangai oleh pemerintah sendiri selain itu Stiglitz mengingatkan akan pentingnya “lem sosial” di dalam masyarakat dimana kontrak sosial merupakan hal yang sangat penting bagi sistem ekonomi pasar yang tak mudah dibuat sebagai peraturan oleh pemerintah. Serikat pekerja tidak bisa digantikan oleh peran pemerintah. Lebih jelasnya Stiglitz mengatakan: *“Arrow, Hirschman [1992], Putnam [1993], Fukuyama [1995], and others have argued that the success of a market economy cannot be understood in terms of narrow economic incentives: norms, social institutions, social capital, and trust play critical roles. It is this implicit social contract, necessary to a market society, that cannot be simply legislated, decreed, or installed by a reform government. Some such “social glue” is necessary in any society”.*

Permasalahannya adalah sejauh mana kebijakan ini bukan saja dapat diterapkan di lapangan tetapi juga sejauh mana program-program ini mampu mengatasi kegagalan pasar sehingga program investasinya terkoordinasi agar sektor manufaktur dapat menjadi motor pembangunan. Seperti yang dibuktikan oleh Maddison (2001) bahwa pendapatan perkapita yang lebih tinggi

hanya didapat melalui industrialiasasi. Melakukan peran koordinasi untuk mengatasi kegagalan pasar tidaklah mudah apalagi di Indonesia kekuatan politik dapat berada di presiden, wakil presiden, menteri koordinator dimana saat ini terdapat empat menteri koordinator. Keberhasilan koordinasi kebijakan industri di Korea Selatan karena koordinatornya adalah presiden yang juga menguasai parati yang berkuasa. Setelah masalah kordinasi selesai maka program subsidi bagi sektor manufaktur baru dapat dilaksanakan tanpa tanggung-tanggung. Murphy, Schleifer, and Vishy (1989: 1025); *"countries such as South Korea that have implemented a coordinated investment program can achieve industrialization of each sector at a lower explicit cost in terms of temporary tariffs and subsidies than a country that industrializes piecemeal. The reason is that potentially large implicit subsidies flow across sectors under a program of simultaneous industrialization."*

Tanpa menempatkan koordinator kebijakan industri pada level presiden kebijakan industri di Indonesia cenderung akan bersifat *piecemeal*. Koordinator kebijakan industri juga harus menjamin kualitas sumber daya manusia yang tinggi serta kesenjangan pendapatan dan kesejahteraan yang rendah dalam menjalankan kebijakan industrialisasi. Rodrik (1995); *"I will argue that in the early 1960s and there after the Korean and Taiwanese governments managed to engineer a significant increase in the private return to capital. They did so not only by removing a number of impediments to investment and establishing a sound investment climate, but more importantly by alleviating a coordination failure which had blocked economic take-off. The latter required a range of strategic interventions - including investment subsidies, administrative guidance and the use of public enterprise - which went considerably beyond those discussed in the standard account. That government intervention could play such aproductive role was conditioned in turn by a set of advantageous initial conditions namely, a favourable human capital and relatively equal distributionof income and wealth".*

Dengan demikian, Presiden sebagai penanggungjawab Nawacita harus menjadi koordinator dari program Nawacitanya sendiri yang seharusnya tidak bisa diwakilkan kepada Menkonya. Program kebijakan industri bukan hanya menyangkut makalah ekuin, tetapi juga pendidikan dan maritim yang masing-masing juga memiliki menteri koordinator yang berbeda. Faktor lainnya yang juga dapat menghambat peran koordinator adalah kekuasan oligarki di politik ekonomi Indonesia *oligarchic power on Indonesia's political economy*. Menurut Hoff dan Stiglitz (2004) justru oligarki juga memerlukan koordinator agar permasalahan koordinasi mereka teratasi. Mereka secara kolektif mendapatkan keuntungan dari hak kepemilikan, namun setiap individu oligarki akan mendapatkan keuntungan optimal jika melakukan penyimpangan, karena itulah para oligarki ini pada gilirannya memerlukan seseorang koordinator apakah itu *pondesta*, diktator atau presiden.

Sulit membayangkan jika peran koordinator dari para oligarki ini dijalankan oleh seorang menko. Menko tidak mendapatkan mandat dari rakyat. Koordinator dalam kebijakan industri

haruslah juga koordinator dalam mengatur para *oligarchic*. Jika presiden tidak mampu menjalankan peran koordinasinya maka Indonesia berpotensi mengalami *"state capture"* dimana kebijakan pemerintah didikte oleh kepentingan privat (Hellmann and Schankermann, 2000). Resikonya bukan saja pertumbuhan ekonomi menjadi rendah tetapi juga ketimpangan pendapatan semakin membesar (Grun and Klasen, 2000). Selain itu, kekuatan oligarki dapat dikelola perannya jika sistem ekonomi menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih adil seperti yang terjadi di Korea Selatan dan Taiwan. Perlu juga diingat bahwa kekuatan oligarki juga berpotensi untuk mempengaruhi birokrasi. Birokrasi yang terlalu lemah cenderung dimanfaatkan oleh pencari rente sementara yang terlalu kuat cenderung membunuh industri swasta. Rodrik 1995; *"This is important because interventionist regimes are prone to two fatal problem shaving their origin in the bureaucracy. The first is that interventions naturally generate opportunities for rent seeking. A weak or poorly supervised bureaucracy is incapable of reining in rent seeking (or becomes part of it). A strong bureaucracy, on the other hand, can choke off entrepreneurial incentives by sticking too closely to the letter of the law and imposing too many cumber some restrictions aimed at rooting out rent seeking. In both Taiwan and Korea, the top political leaders closely monitored the bureaucracy to make sure that the bureaucrats assisted rather than hindered private entrepreneurship. President Park, in particular, was famous for his daily involvement in the impilementation of his economic policies, and his willingness to override the bureaucracy at amoment's notice when businessmen had legitimate complaints"*

Jelas sekali bahwa peran presiden sangat vital dimana dalam kasus Korea Selatan adalah presiden yang menjadi koordinator yang menetapkan insentif, target dan hukuman bagi pelaku industri.

Berkaitan dengan Nawacita pertama untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim seyogyanya lebih menekankan kepada konteks industri maritim dan lokasi strategis perariran laut. Dalam konteks perariran laut maka kedalaman laut di Indonesialah yang memungkinkan kapal-kapal dengan tonase terbesar mampu bergerak dari Samudera Hindia hingga Pasifik. Dengan demikian pembangunan pelabuhan yang berkapasitas seperti Singapura mutlak diperlukan. Sementara itu, sudah saatnya Indonesia memajukan industri perkapalannya. Ada baiknya Indonesia belajar dari Korea Selatan dimana industri pembuatan kapalnya sekalipun pada awalnya mengimpor mesin utama dan baja misalnya dari Jepang dan Eropa Barat. Rodrik 1995 (page 82) mengatakan: *"Hyundai's experience with shipbuilding provides a concrete instance of the imperfect trad ability of technology (and its interaction with scale economies). The company started out by importing its basic design from a Scottish firm, but soon found that this was not working out. The Scottish design relied on building the ship in two halves because the original manufacturer had enough capadty to build only half a ship at a time. When Hyundai followed the same course, it found out that the two halves did not quite fit. Subsequent designs imported from European consulting firms also had problems, in that the firms would not guarantee the rated capacity, leading to costly delays. Engines were available from Japanese suppliers, but*

apparently only at a price higher than that obtained by Japanese shipyards. Moreover, ship buyers would often require design modifications, which Hyundai would be unable to undertake in the absence of an in-house design capability. Only with large enough capacity would it pay for Hyundai to integrate backwards (into design and engine building). In a highly volatile business, scale in turndepended on having access to a steady and reliable customer (a merchant marine). The Korean government provided Hyundai with substantial assistance, as well as an implicit guarantee of markets. Hyundai eventually integrated both backwards and forwards. The government's guarantee came in handy in 1975 when a shipping slump led to the cancellation of foreign orders. President Park responded by forcing Korean refineries to ship oil in Korean-owned tankers, creating a captive demand for Hyundai (Jones and Sakong, 1980)".

Untuk itu industri lainnya juga harus berkembang sehingga industri tersebut juga memiliki permintaan akan kapal. Lebih lanjut Rodrik 1999 page 82: *"The chairman of the Lucky-Goldstar group explains the success of his company in this way:My father and I started a cosmetic cream factory in the late 1940s. At the time,no company could supply us with plastic caps of adequate quality for cream jars, so we had to start a plastic business. Plastic caps alone were not suffient to run the plastic-moulding plant, so we added combs, tooth brushes, and soap boxes. The plastics business also led us to manufacture electrical and electronic products and telecommunication equipment. The plastics business also took us into oil refining which needed a tanker-shipping company. The oil-refining company alone was paying an insurance premium amounting to more than half the total revenue of the then largest insurance company in Korea. Thus, insurance company was started. This natural step-by-step evolution through related businesses resulted in the Lucky-Goldstar group as we see it today, (citedin Amsden, 1989). The quotation clearly illustrates the importance of local inputs and customers as well as of scale economies in fuelling the growth of chaebol While the chaebol could thus internalize some of the coordination issues, they were greatly assisted in doingso by govemment policies......."*

Ruang kebijakan publik pada dasarnya selalu ada untuk mensukseskan program industrialisasi karena semuanya ditentukan oleh *political will* dan tentunya juga pemimpin nasional yang bertanggungjawab dan cerdas. Korea Selatan melakukan subsidi bagi investasi dengan suku bunga kredit yang nilai riilnya negatif semenjak awal tahun 1960-an (Jones dan Sakong, 1980), sementara Taiwan menggunakan insentif perpajakan dimana keduanya menggunakan kriteria ekonomi yang rasional. Irlandia memilih mengundang *Foreign Direct Investment* agar teknologi juga dapat diperoleh melalui *fixed investment* (arias dan Wen 2015). Bukan hanya itu pemerintah mereka juga menetapkan target ekspor. Rodrik 1999 : *"Under Park, however, credit was allocated on the basis of 'economic' criteria: namely, the priority given to different economic activities. Deserving users were judged on the basis of their investment plans, technology, domestic linkages and scale economies."*

Selanjutnya pemerintah juga harus jeli mengantisipasi kemungkinan resiko yang terjadi. Rodrik 1999: *"The government -most notably President Park himself- provided an implicit guarantee that the state would bail out those entrepreneurs investing in 'desirable' activities if circumstances later threatened the profitability of these investments..............The ship building industry is a good example. Without the personal involvement and encouragementof President Park, Hyundai would not have embarked on or completed what eventually became one of the world's best shipyards. The govemment guaranteed the firm's external borrowing, provided extensive subsidies for the infrastructure, and supplied financial guarantees to get Hyundai its first order (Amsden, 1989)".*

Pembangunan yang sukses memerlukan pemimpian yang memiliki kemauan politik yang selanjutnya membuka ruang kebijakan publik yang semakin lebar dengan resiko yang terukur. Park bukan hanya seorang jenderal tetapi juga pemimpin bangsanya yang berhasil. Tanpa Park, Korea Selatan tidak akan seberhasil saat ini. Diperlukan kemauan politik karena pada dasarnya ruang kebijakan publik selalu dapat diciptakan oleh pemimpin nasional. Di bandingkan Park maka Sukarno, Suharto hingga Yudhoyono yang secara relatif menjadi presiden dalam periode yang cukup panjang telah memilih jalan pembangunan yang keliru yang membuat selama 70 tahun Indonesia merdeka terus terperangkap dalam pendapatan rendah. Mereka gagal untuk menjadikan Indonesia sebagai negara industri maju!

Satu cita dari Nawacita untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan hanya akan tercapai jika pendidikan di pedesaan memiliki kualitas yang sama atau bahkan lebih baik dari perkotaan. Perlu diingat bahwa pekerja informal di sektor pertanian mencapai 90%, dan di sektor non pertanian sekitar 50% (OECD/Asian Development Bank (2015)). Untuk itu kualitas pekerja harus dapat ditingkatkan. Artinya pembangunan sumber daya manusia dalam hal ini pendidikan harus menjadi prioritas utama. Kualitas guru di pedesaan kalah ketimbang guru di perkotaan. OECD/Asian Development Bank (2015): *"However, regional and district disparities remain in student access,educational quality, and teacher certification in remote and poor areas. Thedifficulty of providing access to education in remote areas compounds the problem of young people's participation in schooling, particularly among communities with traditionally low educational aspirations. While there is no overall shortage of teachers, those in remote and rural areas are less qualified and too often absent from their schools and classrooms. Rates of teacher absenteeism are highest in districts with the highest proportion of children not at school".*

Masalah pendidikan pedesaan lainnya adalah rendahnya peluang sekolah sebelum sekolah dasar karena masalah akses dan daya beli. OECD/Asian Development Bank (2015): *"Children in urban areas are more likely to attend pre-primary education than in rural areas (38.6% against 28.4% in 2011). This may be as a result of better availability, accessibility and affordability of pre-primary education in urban areas (UNICEF, 2013).*

Pedesaan juga kekurangan guru matematika, ilmu pengetahuan alam dan bahasa. OECD/ Asian Development Bank (2015): *"More principals in private schools reported teacher shortages than those in public schools, and principals of disadvantaged schools and/ or schools in rural areas reported more teacher shortages than those of advantaged and/or urban schools (PISA, 2012)".*

Lebih dari itu pedesaan kekurangan sumber daya dan juga mengalami diskriminasi. OECD/ Asian Development Bank (2015): *"Higher-performing countries tend to distribute schools' educational resourcesmore equally between socio-economically advantaged and disadvantaged schools. In Indonesia, the principals of schools located in rural and disadvantaged areas reported more shortages or inadequate resources than the principals of schools in town and advantaged areas. In addition, principals of lower secondary schools reported more shortages or inadequate resources than principals of upper secondary schools (PISA, 2012)".*

Tantangan presiden Joko Widodo dan presiden-presiden Indonesia masa mendatang lainnya sangatlah besar sekali karena peluang perekonomian Indonesia untuk terperangkap dalam pendapatan rendah masih sangat tinggi yaitu 80% (Arias dan Wen 2015), sedangkan peluang Indonesia untuk masuk menjadi negara pendapatan tinggi hanya 3% (lihat Tabel 7). Bahayanya lagi adanya kemungkinan negara pendapatan menengahpun bisa kembali lagi menjadi negara berpendapatan rendah bukan hanya masuk perangkap pendapatan menengah. Sudah saatnya kebijakan industri menjadi pilihan yang serius bagi Indonesia!

Kesimpulan

Berdasarkan data dari *Tabel Penn World*, perekonomian Indonesia baru akan masuk ke dalam perangkap pendapatan menengah tiga belas tahun lagi jika Indonesia beruntung memiliki pertumbuhan tahunan PDB per kapita sebesar 4,5% secara konsisten. Artinya perangkap pendapatan menengah akan terjadi paska presiden Joko Widodo (sekalipun presiden Joko Widodo dapat menjadi presiden untuk kedua kalinya) Sebelum mencapai waktu tiga belas tahun lagi, ancaman bagi Indonesia adalah terperangkap dalam pendapatan rendah. Perekonomian Indonesia terancam akan masuk dalam perangkap pendapatan menengah karena perekonomian Indonesia bukan hanya lemah dalam sumber daya manusia, namun juga perkembangan sektor manufakturnya juga terseok-seok.

Sementara itu kinerja ekspor barang yang memiliki kandungan teknologi tinggi bukan saja juga rendah tetapi kontrubusinya terhadap ekspor juga masih rendah dan cenderung menurun. Faktor lain yang semakin membuat pesimis akan kemampuan perekonomian Indonesia untuk menghindar dari perangkap tersebut adalah kinerja total produktivitas faktor total dan perkembangan stok modal yang juga sangat lemah. Perkembangan sumber daya manusia, modal saham dan total faktor produksi Indonesia secara relatif tidak dapat mengimbangi

kecepatan pertumbuhan yang dimiliki oleh perekonomian negara yang berada pada *frontier* teknologi seperti Korea Selatan.

Kepincangan pendapatan semakin memburuk di Indonesia, maka semakin besar potensi penurunan dalam pertumbuhan ekonomi. Sebuah signal serius bagi Indonesia yang berupaya untuk menghindar dari perangkap pendapatan menengah dan rendah. Belajar dari keberhasilan kebijakan industri di Korea Selatan dan Taiwan karena tidak ada kepincangan kekayaan dan mereka melakukan reformasi agraria maka reformasi agrarian dalam Nawacita adalah tepat.

Kualitas sumber daya manusia yang tinggi merupakan persayaratan penting bagi berhasilnya industrialisasi. Nawacita harus menggunakan barometer internasional dalam mengukur keberhasilan pendidikan di Indonesia dari sisi *output* seperti PISA. Sektor pendidikan di Indonesia harus dilakukan perombakan total karena yang terjadi selama ini adalah proses pembodohan, baik pembodohan dalam membaca, matematika dan ilmu pengetahuan alam. Ketertinggalan Indonesia dalam sumber daya manusia sangatlah membahayakan. Sulit berharap bahwa percepatan pertumbuhan ekonomi tinggi dari akumulasi sumber daya manusia di Indonesia dari sisi kognitif sebagaimana juga dari sisi lamanya sekolah dapat dijadikan pijakan bagi terciptanya pertumbuhan tinggi yang berkelanjutan dalam perekonomian Indonesia dibandingkan negara dengan pertumbuhan tinggi yang ada selama ini pada perekonomian dengan frontier teknologi. Lemahnya sumber daya manusia Indonesia tampaknya juga membuat daya tawar pekerja dalam perekonomian yang relatif juga rendah yang terlihat dari pangsa kompensasi pekerja dalam produk domestik bruto yang secara relatif lebih rendah dari Korea Selatan dari periode panjang tahun 1960 hingga 2011.

Tanpa kesehatan maka upaya untuk mencapai pendidikan yang lebih berkualitas akan semakin sulit tercapai karena itu jaminan kesehatan bagi semua warga negara Indonesia sangatlah penting. Seharusnya, pembiayaan publik memainkan peran yang harus lebih dominan dalam pembiayaan kesehatan di Indonesia seperti halnya yang dilakukan oleh negara-negara berpendapatan tinggi.

Kontrak sosial tidak akan bisa diganti oleh peraturan pemerintah. Dikhawatirkan kekuatan oligarki akan menyusupkan keinginannya melalui pemerintah. Pasar tenaga kerja di Indonesia harus tetap mengandalkan pendekatan tawar menawar secara tiga pihak sesuai dengan konvesi ILO yang juga ditandatangi oleh Indonesia. Belajar dari Korea Selatan, pendidikan yang berkualitas pada gilirannya akan mampu meningkatkan daya tawar buruh dan kesejahteraan buruh tanpa perlu pemerintah menentukan naik turunya upah pekerja. Padahal, Korea Selatan di alam non demokrasi perekonomiannya sudah pro pekerja dimana kompensasi terhadap pekerja dalam perekonomian selalu lebih besar dari pada modal semenjak 1960. Sementara di Indonesia nilai tambah pekerja selalu di bawah nilai tambah modal hal ini disebabkan sumber daya manusia di Indonesia sangatlah lemah dibandingkan Korea Selatan.

Urbanisasi dapat di atasi jika sektor manufaktur dapat berkembang dengan baik sehingga kelebihan tenaga kerja dari sektor pertanian yang tak mendapatkan pekerjaan tidak akan tertampung di sektor jasa yang pendapatannya secara relatif lebih rendah (termasuk sektor informal di perkotaan).

Kartel politik atau kekuatan oligarki dapat dikelola secara baik mengingat mereka juga memerlukan koordinator, yang dalam konteks Indonesia koordinator tersebut adalah presiden yang seharusnya juga merupakan koordinator dari kebijakan industri, sehingga kegagalan pasar dalam masalah koordinasi kebijakan industri juga dapat di atasi dengan syarat keadilan sosial terjaga dengan baik dan presiden mampu mengelola birokrasinya dengan optimal.

Struktural transformasi Indonesia dalam jangka panjang yang mampu menyelamatkan perekonomian Indonesia dari perangkap pendapatan rendah dan menengah hanya dapat tercapai jika semua presiden Indonesia hingga presiden di masa depan mampu melakukan fungsi kordinasinya dengan baik dalam mengelola kegagalan pasar dalam industrialisasi dan kekuatan oligarki. Untuk itu diperlukan konsistensi kebijakan agar presiden-presiden di masa depan terus menjalankan kebijakan industri secara konsisten.

Nilai tambah sektor manufaktur terhadap PDB yang menurun mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia gagal bersaing dengan sektor manufaktur negara lain yang mengandalkan upah murah dan juga gagal bersaing dengan sektor manufaktur negara maju yang mengandalkan keahlian yang tinggi dan inovasi. Indonesia tidak dapat mengelola secara mulus transformasi perubahan yang konsisten dari pertumbuhan yang didorong oleh sumber daya alam, dengan upah murah, menuju pertumbuhan ekonomi yang berbasis teknologi yang lebih tinggi!

Indonesia harus memanfaatkan kekayaan maritimnya untuk mendukung program industrialisasi berbasis teknologi tinggi. Negara maritim dapat diperkuat dengan menghidupkan industri perkapalan dan membangun kapasitas pelabuhan agar bertaraf internasional. Untuk itu Indonesia dapat belajar dari Korea Selatan yang memiliki luas laut lebih kecil dari pada Indonesia.

Sektor manufaktur Indonesia sangat sensitif terhadap gangguan ekstrenal seperti krisis ekonomi, dimana peran eskpor manufatur terhadap total ekspor barang turun dari 50 % menuju di bawah 40 % pada era krisis Asia tahun 1998, sementara Korea Selatan sekalipun terjadi penurunan rasionya masih berada pada 80 an % . Dengan demikian tampaknya modal Indonesia untuk melewati perangkap pendapatan menengah masih belum mencukupi.

Indonesia memiliki rasio eskpor teknologi tinggi terhadap total ekspor yang rendah dan secara sistematis mengalami penurunan. Berbeda dengan Indonesia, Korea Selatan justru secara konsisten tumbuh positif dengan kontribusi melewati 30%. Ini merupakan indikator terpenting

dalam mendukung keyakinan apakah Indonesia akan mampu melewati perangkap pendapatan menengah. Sayangnya berdasarkan indikator ini tampaknya kemampuan perekonomian Indonesia untuk terbebas dari perangkap pendapatan menengah semakin jauh panggang dari pada api.

Peluang perekonomian Indonesia terperangkap dalam pendapatan rendah adalah 80%, peluang untuk kembali menjadi pendapatan rendah masih terbuka yaitu sebesar 17% (jika Indonesia berhasil masuk kependapatan menengah), sedangkan peluang Indonesia untuk masuk menjadi negara pendapatan tinggi hanya 3%.

Nawacita memberikan harapan yang besar sepanjang Nawacita diarahkan secara serius dan total untuk penguatan sektor manufaktur sehingga kandungan ekspornya secara konsisten mengalami penguatan yang sistematis akan barang yang bersifat teknologi tinggi dan tentunya juga wajib dilakukan penguatan sumber daya manusiaIndonesia agar memiliki kualitas yang tinggi. Hanya dengan cara itu perangkap pendapatan rendah dan menengah dapat dihindari.

Table 1.

Rate of acceleration or deceleration in performance (Quadratic term) on Mean mathematics performance in PISA 2003 through 2012

	Coef.	S.E.
Hong Kong-China	0,3	(0,21)
Indonesia	-0,7	(0,26)
Jordan	-0,2	(0,51)
Kazakhstan	m	M
Latvia	0,1	(0,20)
Liechtenstein	0,3	(0,25)
Lithuania	0,7	(0,37)
Macao-China	0,4	(0,14)
Malaysia	m	M
Montenegro	0,2	(0,31)
Peru	m	M
Qatar	-2,3	(0,21)
Romania	0,3	(0,54)
Russian Federation	0,1	(0,23)
Serbia	0,0	(0,45)
Shanghai-China	m	M
Singapore	m	M
Chinese Taipei	1,3	(0,52)
Thailand	0,2	(0,17)
Tunisia	0,3	(0,20)
United Arab Emirates - Ex. Dubai	m	M
Uruguay	-0,6	(0,18)

OECD (2013)PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do. Student Performance in Reading, Mathematics and Science (Volume I), Paris.

Table 2.

Rate of acceleration or deceleration in performance (Quadratic term) on Mean reading performance in PISA 2000 through 2012

	Coef.	S.E.
Hong Kong-China	0,1	(0,19)
Indonesia	-0,4	(0,25)
Jordan	-0,6	(0,65)
Kazakhstan	m	M
Latvia	-0,4	(0,18)
Liechtenstein	-0,4	(0,18)
Lithuania	0,6	(0,55)
Macao-China	0,8	(0,23)
Malaysia	m	M
Montenegro	-0,1	(0,51)
Peru	0,0	(0,31)
Qatar	-2,4	(0,47)
Romania	1,2	(0,28)
Russian Federation	0,8	(0,19)
Serbia	-2,0	(0,59)
Shanghai-China	m	M
Singapore	m	M
Chinese Taipei	1,6	(0,60)
Thailand	0,7	(0,20)
Tunisia	-0,1	(0,30)
United Arab Emirates - Ex. Dubai	m	M
Uruguay	0,2	(0,28)

OECD (2013)PISA 2012
Results: What Students Know and Can Do.
Student Performance in Reading,
Mathematics and Science (Volume I), Paris.

Table 3.

Mean science performance in PISA 2006 through 2012

	Change between 2006 and 2012 (PISA 2012 - PISA 2006)		Change between 2009 and 2012 (PISA 2012 - PISA 2009)		Annualised change in science across PISA assessments	
	Score dif.	S.E.	Score dif.	S.E.	Annual change	S.E.
Hong Kong-China	13	(5,0)	6	(4,3)	2,1	(0,85)
Indonesia	-12	(7,7)	-1	(5,7)	-1,9	(1,33)
Jordan	-13	(5,5)	-6	(5,1)	-2,1	(0,91)
Kazakhstan	M	m	24	(4,8)	8,1	(1,56)
Latvia	13	(5,4)	8	(4,6)	2,0	(0,90)
Liechtenstein	3	(6,5)	5	(5,3)	0,4	(1,03)
Lithuania	8	(5,1)	4	(4,4)	1,3	(0,94)
Macao-China	10	(3,8)	10	(2,4)	1,6	(0,64)
Malaysia	M	m	-3	(4,5)	-1,4	(1,96)
Montenegro	-2	(3,8)	9	(3,0)	-0,3	(0,64)
Peru	M	m	4	(5,4)	1,3	(1,94)
Qatar	34	(3,7)	4	(2,3)	5,4	(0,61)
Romania	20	(6,4)	11	(5,1)	3,4	(1,08)
Russian Federation	7	(5,8)	8	(4,8)	1,0	(1,00)
Serbia	9	(5,8)	2	(4,6)	1,5	(1,03)
Shanghai-China	M	m	6	(4,3)	1,8	(1,50)
Singapore	M	m	10	(2,9)	3,3	(0,93)
Chinese Taipei	-9	(5,5)	3	(4,0)	-1,5	(0,92)
Thailand	23	(5,1)	19	(4,6)	3,9	(0,82)
Tunisia	13	(5,7)	-3	(4,8)	2,2	(1,03)
United Arab Emirates - Ex. Dubai	M	m	10	(5,4)	5,1	(2,75)
Uruguay	-12	(5,2)	-11	(4,3)	-2,1	(0,91)

OECD (2013)PISA 2012
Results: What Students Know and Can Do.
Student Performance in Reading,
Mathematics and Science (Volume I), Paris.

Table 4.

Mean science performance in PISA 2006 through 2012

	PISA 2006		PISA 2009		PISA 2012	
	Mean score	S.E.	Mean score	S.E.	Mean score	S.E.
OECD average 2006	498	(0,5)	501	(0,5)	501	(0,5)
OECD average 2009	M	m	501	(0,5)	501	(0,5)
Hong Kong-China	542	(2,5)	549	(2,8)	555	(2,6)
Indonesia	393	(5,7)	383	(3,8)	382	(3,8)
Jordan	422	(2,8)	415	(3,5)	409	(3,1)
Kazakhstan	M	m	400	(3,1)	425	(3,0)
Latvia	490	(3,0)	494	(3,1)	502	(2,8)
Liechtenstein	522	(4,1)	520	(3,4)	525	(3,5)
Lithuania	488	(2,8)	491	(2,9)	496	(2,6)
Macao-China	511	(1,1)	511	(1,0)	521	(0,8)
Malaysia	M	m	422	(2,7)	420	(3,0)
Montenegro	412	(1,1)	401	(2,0)	410	(1,1)
Peru	M	m	369	(3,5)	373	(3,6)
Qatar	349	(0,9)	379	(0,9)	384	(0,7)
Romania	418	(4,2)	428	(3,4)	439	(3,3)
Russian Federation	479	(3,7)	478	(3,3)	486	(2,9)
Serbia	436	(3,0)	443	(2,4)	445	(3,4)
Shanghai-China	M	m	575	(2,3)	580	(3,0)
Singapore	M	m	542	(1,4)	551	(1,5)
Chinese Taipei	532	(3,6)	520	(2,6)	523	(2,3)
Thailand	421	(2,1)	425	(3,0)	444	(2,9)
Tunisia	386	(3,0)	401	(2,7)	398	(3,5)
United Arab Emirates - Ex. Dubai	M	m	429	(3,3)	439	(3,8)
Uruguay	428	(2,7)	427	(2,6)	416	(2,8)

OECD (2013)PISA 2012
Results: What Students Know and Can Do.
Student Performance in Reading,
Mathematics and Science (Volume I), Paris.

Table 5.
Mean mathematics performance in PISA 2003 through 2012

	PISA 2003		PISA 2006		PISA 2009		PISA 2012	
	Mean score	S.E.	Mean score	S.E.	Mean score	S.E.	Mean score	S.E.
OECD average 2003	500	(0,6)	498	(0,5)	499	(0,6)	496	(0,5)
OECD average 2006	M	m	494	(0,5)	496	(0,5)	494	(0,5)
OECD average 2009	M	m	m	M	496	(0,5)	494	(0,5)
Hong Kong-China	550	(4,5)	547	(2,7)	555	(2,7)	561	(3,2)
Indonesia	360	(3,9)	391	(5,6)	371	(3,7)	375	(4,0)
Jordan	M	m	384	(3,3)	387	(3,7)	386	(3,1)
Kazakhstan	M	m	m	M	405	(3,0)	432	(3,0)
Latvia	483	(3,7)	486	(3,0)	482	(3,1)	491	(2,8)
Liechtenstein	536	(4,1)	525	(4,2)	536	(4,1)	535	(4,0)
Lithuania	M	m	486	(2,9)	477	(2,6)	479	(2,6)
Macao-China	527	(2,9)	525	(1,3)	525	(0,9)	538	(1,0)
Malaysia	M	m	m	M	404	(2,7)	421	(3,2)
Montenegro	M	m	399	(1,4)	403	(2,0)	410	(1,1)
Peru	M	m	m	M	365	(4,0)	368	(3,7)
Qatar	M	m	318	(1,0)	368	(0,7)	376	(0,8)
Romania	M	m	415	(4,2)	427	(3,4)	445	(3,8)
Russian Federation	468	(4,2)	476	(3,9)	468	(3,3)	482	(3,0)
Serbia	M	m	435	(3,5)	442	(2,9)	449	(3,4)
Shanghai-China	M	m	m	M	600	(2,8)	613	(3,3)
Singapore	M	m	m	M	562	(1,4)	573	(1,3)
Chinese Taipei	M	m	549	(4,1)	543	(3,4)	560	(3,3)
Thailand	417	(3,0)	417	(2,3)	419	(3,2)	427	(3,4)
Tunisia	359	(2,5)	365	(4,0)	371	(3,0)	388	(3,9)
United Arab Emirates - Ex. Dubai	M	m	m	M	411	(3,2)	423	(3,2)
Uruguay	422	(3,3)	427	(2,6)	427	(2,6)	409	(2,8)

OECD (2013)PISA 2012
Results: What Students Know and Can Do.
Student Performance in Reading,
Mathematics and Science (Volume I), Paris.

Table 6.

Mean reading performance in PISA 2000 through 2012

	PISA 2000		PISA 2003		PISA 2006		PISA 2009		PISA 2012	
	Mean score	S.E.	Mean score	S.E.	Mean score	S.E.	Mean score	S.E.	Mean score	S.E.
OECD average 2000	496	(0,7)	497	(0,6)	490	(0,7)	496	(0,5)	498	(0,6)
OECD average 2003	m	m	494	(0,6)	492	(0,6)	497	(0,5)	498	(0,5)
OECD average 2006	m	m	m	m	489	(0,6)	494	(0,5)	496	(0,5)
OECD average 2009	m	m	m	m	m	m	494	(0,5)	497	(0,5)
Hong Kong-China	525	(2,9)	510	(3,7)	536	(2,4)	533	(2,1)	545	(2,8)
Indonesia	371	(4,0)	382	(3,4)	393	(5,9)	402	(3,7)	396	(4,2)
Jordan	m	m	m	m	401	(3,3)	405	(3,3)	399	(3,6)
Kazakhstan	m	m	m	m	m	m	390	(3,1)	393	(2,7)
Latvia	458	(5,3)	491	(3,7)	479	(3,7)	484	(3,0)	489	(2,4)
Liechtenstein	483	(4,1)	525	(3,6)	510	(3,9)	499	(2,8)	516	(4,1)
Lithuania	m	m	m	m	470	(3,0)	468	(2,4)	477	(2,5)
Macao-China	m	m	498	(2,2)	492	(1,1)	487	(0,9)	509	(0,9)
Malaysia	m	m	m	m	m	m	414	(2,9)	398	(3,3)
Montenegro	m	m	m	m	392	(1,2)	408	(1,7)	422	(1,2)
Peru	327	(4,4)	m	m	m	m	370	(4,0)	384	(4,3)
Qatar	m	m	m	m	312	(1,2)	372	(0,8)	388	(0,8)
Romania	428	(3,5)	m	m	396	(4,7)	424	(4,1)	438	(4,0)
Russian Federation	462	(4,2)	442	(3,9)	440	(4,3)	459	(3,3)	475	(3,0)
Serbia	m	m	m	m	401	(3,5)	442	(2,4)	446	(3,4)
Shanghai-China	m	m	m	m	m	m	556	(2,4)	570	(2,9)
Singapore	m	m	m	m	m	m	526	(1,1)	542	(1,4)
Chinese Taipei	m	m	m	m	496	(3,4)	495	(2,6)	523	(3,0)
Thailand	431	(3,2)	420	(2,8)	417	(2,6)	421	(2,6)	441	(3,1)
Tunisia	m	m	375	(2,8)	380	(4,0)	404	(2,9)	404	(4,5)
United Arab Emirates - Ex. Dubai	m	m	m	m	m	m	423	(3,7)	432	(3,3)
Uruguay	m	m	434	(3,4)	413	(3,4)	426	(2,6)	411	(3,2)

OECD (2013)PISA 2012
Results: What Students Know and Can Do.
Student Performance in Reading,
Mathematics and Science (Volume I), Paris.

Tabel 7.

Probabiliti Transisi Pendapatan antara 1950 hingga 2011

A: 10-Year Transitions

		Ending Point		
		≤15%	>15 to 50%	>50%
Starting Point	≤15%	0.94	0.06	0.00
	>15 to 50%	0.08	0.83	0.09
	>50%	0.00	0.10	0.90

B: 20-Year Transitions

		Ending Point		
		≤15%	>15 to 50%	>50%
Starting Point	≤15%	0.92	0.08	0.00
	>15 to 50%	0.13	0.75	0.12
	>50%	0.00	0.12	0.88

C: Start-to-End Transitions (30 to 140 Years)

		Ending Point		
		≤15%	>15 to 50%	>50%
Starting Point	≤15%	0.93	0.05	0.02
	>15 to 50%	0.31	0.51	0.18
	>50%	0.00	0.17	0.83

Sumber: Arias and Wen 2015 (Their calculation based on World Penn Table 8.0).

Daftar Pustaka

Arias, Maria, A. And Yi Wen (2015), Trapped Few Developing Countries Can Climb the Economic Ladder or Stay There, Regional Economist, October, Federal Reserve Bank of St. Louis.

Alesina, A. and Dani Rodrik (1994), "Distributive Politics and Economic Growth, Quarterly Journal of Economics, Vol 109, May, pp. 465-85

Amsden, A. H. (1989). Asia's Next Giant: South Korea and Late Industrialivtion, Oxford University Press, New York.

Arrow, Kenneth 1972. Gifts and Exchanges. Philosophy and Public Affairs. 1 (4): 343-62.

Badan Pusat Statistik, 2015. Indikator Kesejahteraan Rakyat.

Basri, Faisal, A. Prasetyantoko and Gatot Arya Putra (October 2012), 'Indonesia's Economy: Economy grows in the middle of crisis in developed countries, in Economy of Tomorrow, Friedrich Ebert Stiftung.

Booth, Anne (1996), "Intergovernmental Relations and Fiscal Policy in Indonesia", in Christine Fletcher (Editor), Equity and Development Across Nations, St. Leonards: Allen and Unwin.

Booth, Anne. 1999, 'Initial conditions and miraculous growth: why is South East Asia different from Taiwan and South Korea?', World Development 27:301-21.

Eichengreen, Barry; Park, Donghyun; Shin, Kwanho. 2013. "Growth Slowdosn Redux: NewEvidence on the Middle Income Trap." NBER Working Paper No. 18673.

_____. 2012. "When Fast Growing Economies Slow Down: International Evidence and Implications for China." Asian Economic Papers, 11, 42-87.

Feenstra, Robert C.; Inklaar, Robert; Timmer, Marcel. 2015. "The Next Generation of the Penn World Table."

Fields, G. S., Cichello, P. L., Freije, S., Men´edez, M. & Newhouse, D. (2003). Escaping from Poverty: Household Income Dynamics in Indonesia, south Africa, Spain, and Venezuela. In G. S. Fields, &G. Pfeffermann (Eds.), Pathways out of Poverty – Private Firms and Economic Mobility in Developing Countries. Kluwer Academic Publishers, Norwell.

Fisman, Raymond. 2001. "Estimating the Value of Political Connections." The American EconomicReview, 91(4), 1095-102.

Fogel, Robert. 2010. "123,000,000,000,000." Foreign Policy, (December 20, 2010).

Fukuyama, Francis 1995. Trust. New York: Free Press.

Greenspan, Alan. 2013. The Map and the Territory: Risk, Human Nature and the Future of Forecasting. New York NY: Penguin Press.

Grün, C. and S. Klasen.2000. Growth, Inequality, and Well-Being: Comparisons across Space and Time. Universityof Munich, mimeographed.

Hall, Robert and Charles I Jones. 1999. "Why Do Some Countries Produce So Much More Output Per Capita Than Others?" Quarterly Journal of Economics, 114(1), 83-116.

Hallward-Driemeier, Mary and Lant Pritchett. 2011. "How Business Is Done and the 'Doing Business'Indicators: The Investment Climate When Firms Have Climate Control," Washington DC: World Bank,

Hausmann, Ricardo; Lant Pritchett and Dani Rodrik. 2005. "Growth Accelerations." Journal of Economic Growth, 10(5), 303-29.

Hellman, Joel; Jones, Geraint; Kaufmann, Daniel. 2000. "Sieze the State, Sieze the Day: State Capture, Corruption, and Influence in the Transition." World Bank Policy Research Working Paper No. 2444.

Hirschman, Albert O.1992. Rival Views of Market Society. Cambridge: Harvard University Press.

Hoff, Karla, and Joseph Stiglitz (2004). ìAfter the Big Bang? Obstacles to the Emergence of the Rule of Law in Post-Communist Societies,îAmerican Economic Review, 94(3), 753-764.

Isaksson, A. (2007), "Determinats of Total factor Productivity: a literatur review,"mimeograph, Vienna: UNIDO.

Jones, Leroy and H Sakong (1980). Government, Business, and Entrepreneurship in Economic Development: The Koretai Case, Harvard University Press, Cambridge, MA.

Jones, Benjamins and Benjamin Olken. 2008. "The Anatomy of Stop-Start Growth." Review ofEconomics and Statistics, 90(3), 582-87.

Kar, Sabyasachi; Pritchett, Lant; Raihan, Selim; Sen, Kunal. 2013. "Looking for a Break: Identifying Transitions in Growth Regimes." Journal of Macroeconomics, 38(PB), 151-66.

Kenny, Charles; Pritchett, Lant. 2013. "Promoting Millennium Development Ideals: The Risks of Defining Development Down " Center for Global Development, Working Paper, (338).

Leamer, Edward. 2010. "Tantalus on the Road to Asymptopia." Jounral of Economic Perspectives, 24(2), 31-46.

Levine, Ross; Renelt, David. 1992. "A Sensitivity Analysis of Cross-Country Growth Regressions."American Economic Review, 82(4), 942-63.

Maddison, A. (2001), The World Economy: A Millennial Perspective, Development Centre Studies, OECD Publishing, http://dx.doi.org/10.1787/9789264189980-en.

Mowery, D.C. and N. Rosenberg (1989), Technology and the Pursuit of Economic Growth, Cambridge University Press, Cambridge.

Murphy, Kevin M., Andrei Shleifer, and Robert W. Vishny (1989). Industrialization and the big push. Journal of Political Economy 97 (5): 1003-1026.

North, Douglas; John Wallis and Barry Weingast. 2009. Social Order: A Conceptual Framework for Interpreting Recorded Human History. Cambridge University Press.

OECD (2013)PISA 2012 Results: What Students Know and Can Do. Student Performance in Reading, Mathematics and Bidang sains (Volume I), Paris.

OECD Health Statistics 2014 How does Indonesia compare?

OECD/Asian Development Bank (2015), Education in Indonesia: Rising to the Challenge, OECD Publishing, Paris.http://dx.doi.org/10.1787/9789264230750-en

Pritchett, Lant. 1997. "Divergence, Big Time." Journal of Economic Perspectives, 11(3), 3-17.

_____. 2011. "How Good Are Good Transitions? Indonesia after Soeharto for Instance?" Employment, living standards and poverty in contemporary Indonesia.

_____. 2000. "Understanding Patterns of Economic Growth: Searching for Hills among Mountains, Plateaus, and Plains." World Bank Economic Review, 14(2), 221-50.

Pritchett, Lant; Werker, Eric. 2012. “Developing the Guts of a Gut (Grand Unified Theory): Elite Commitment and Inclusive Growth.” Effective States and Inclusive Development Research Centre (ESID) Working Paper No. 16/12.

Putnam, Robert 1993. Making Democracy Work. Princeton: Princeton University Press.

Rodrik, Dani (1995), Getting Interventions Right: How South Korea and Taiwan Grew Rich”,
Economic Policy, Number 20, April.

Rodrik, Dani. 1999. “Where Did All the Growth Go? External Shocks, Social Conflict, and GrowthCollapses.” Journal of Economic Growth, 4(December), 358-412.

Rodrik, Dani; Subramanian, Arvind. 2004. “From “Hindu Growth” to Productivity Surge: The Mystery of the Indian Growth Transition.” NBER Working Papers 10376 (March).

Rodrik, Dani; Wacziarg, Romain. 2005. “Do Democratic Transitions Produce Bad Economic Outcomes?” American Economic Review, 95(2), 50-55.

Romer, Paul (2015), in http://paulromer.net/speeding-up-and-missed-opportunities-evidence/.

Sala-i-Martin, Xavier. 1997. “I Just Ran Four Million Regressions.” NBER Working Paper No. 6252.

Shleifer, Andrei and Robert Vishny. 1993. “Corruption.” Quarterly Journal of Economics, 108(3), 599-614.

Silver, Nate. 2012. The Signal and the Noise: Why So Many Predications Fail--but Some Don’t. NewYork NY: Penguin Press.

Stiglitz, J., 1999. Whither Reform? Ten Years of the Transition. Annual Bank Conference on Development Economics, April 28 to 30, World Bank, Washington, DC.

Taleb, Nassim Nicolas. 2007. The Black Swan: The Impact of the Highly Improbable. New York NY: Random House.

UNICEF (United Nations Children’s Fund) (2013), “Indonesia socio economic survey 2011: Inequalities in education”, unpublished draft, UNICEF.

World Development Indicators 2015.

World Economic Outlook Database 2015.

Wisnu, Dinna, Faisal Basri and Gatot Arya Putra (2015) ‘Ambitious but inadequate: social welfare policies under Yudhoyono’ in Edward Aspinall, Marcus Mietzner, and Dirk Tomsa ‘The Yodhoyono Presidency: Indonesia’s Decade of Stability and Stagnation’ Singapore: Iseas.

Daftar Singkatan

IMF : International Monetary Fund
PDB : Pendapatan Domestik Bruto
TPW : Tabel Penn World
TFP : Total Factor Productivity (Total Faktor Produktivitas)
PPP : Purchasing Power Parity (Paritas Daya Beli)

Tentang Penulis

Faisal Basri, ekonom dan juga politisi ternama Indonesia. Pernah menjadi direktur Institute for Develement of Economics and Finance (INDEF). Saat ini menjabat sebagai Editorial Board dari quarterly Journal of Indonesia Economy. Dia juga adalah anggota dewan penasehat Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat Universitas Indonesia (LPEM-UI), di bidang politik ekonomi. Faisal Basri pernah menjadi anggota Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU). Dia telah menulis dan menerbitkan lebih dari 50 hasil penelitian, 95 buku (sebagai penulis, co-penulis, editor) dan *working paper*, 150 artikel di Surat kabar dan Majalah. Pada tahun 2012, Faisal Basri mencoba maju di pemilihan Gubernur DKI Jakarta lewat jalur independen. Pada bulan November 2014 Pemerintah RI melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengangkat Faisal Basri sebagai Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas.

Gatot Arya Putra, menyelesaikan masternya di Magister Management Universitas Indonesia, Program Manajemen International. Dia turut mendirikan dan sebagai penasehat Indonesian Researh & Strategic Analysis (IRSA) dan Research Associate of Akademika (Public Policy Studies). Turut bergabung sebagai team leader analisa ekonomi di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).